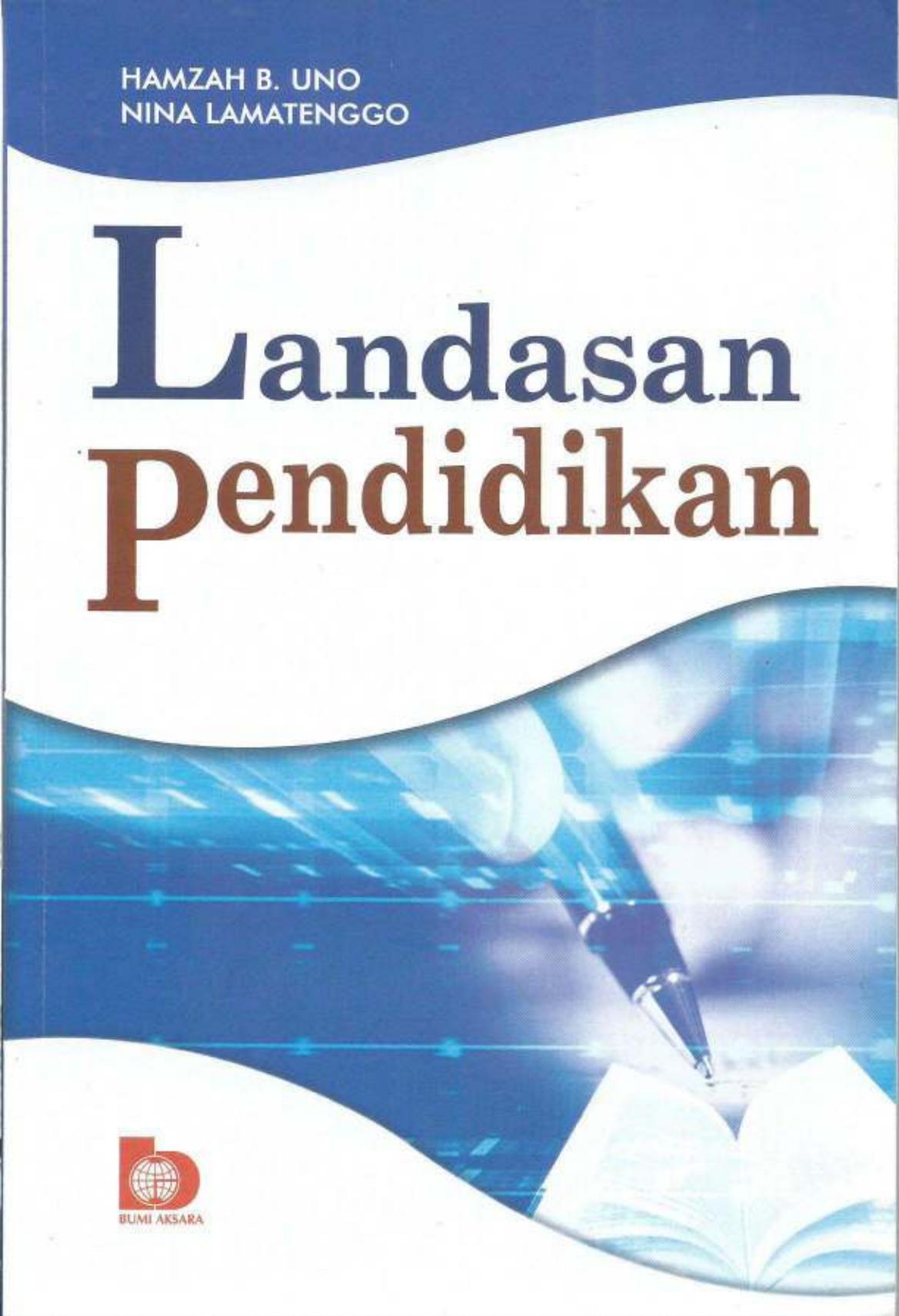


HAMZAH B. UNO  
NINA LAMATENGGO

# Landasan Pendidikan



BUMI AKSARA



# **Landasan Pendidikan**

Hamzah B. Uno  
Nina Lamatenggo

# Landasan Pendidikan

 Pusat  
**BUMI AKSARA**



dilaksanakan hanya sekedar simbolisme yang mengarah pada pemenuhan diploma atau ijazah dan belum menyentuh esensi pendidikan bagi seseorang. Artinya, terjadi kesalahan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Salah satu hal yang diprediksikan sebagai sumber kesalahan kurang berhasil pendidikan kita adalah belum adanya komitmen dari kita untuk menjadikan pendidikan sebagai komoditas unggulan dalam mencerdaskan bangsa.

Pada bagian awal buku ini, disoroti tentang masalah kesemerawutan global yang merupakan ekkses pendidikan. Mungkin ada di antara kita yang kurang menyadari bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan manusia. Pendidikan yang berkualitas akan membawa perubahan yang besar pula dalam pola hidup manusia. Di Indonesia yang terdiri dari beribu pulau, masih banyak anak bangsanya yang belum terjamah oleh pendidikan, apalagi pendidikan yang berorientasi pasar global.

Pada bagian lain buku ini, disoroti beberapa landasan yang merupakan pijakan dalam melakukan pendidikan. Landasan tersebut meliputi landasan filosofi pendidikan, landasan psikologi pendidikan, landasan antropologi pendidikan, landasan teknologi pendidikan, landasan sosial pendidikan, landasan ekonomi pendidikan, landasan teknologi komunikasi pendidikan, dan landasan budaya pendidikan. Landasan pendidikan ini akan mewarnai macam dan corak cara belajar dan cara pembelajaran berdasarkan jenis dan karakter masyarakat. Hal ini penting diperhatikan agar hakikat pendidikan tidak terbelokkan ke arah yang tidak sesuai dengan yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan bangsa Indonesia.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan dan berbagai pihak sehingga buku ini dapat terbit. Rasa syukur dan terima kasih itu dihaturkan kepada guru-guru yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan pendidikan. Kini buah pemikiran tersebut telah menjadi benih-benih mutiara yang tumbuh di dalam alam pikir kami sebagai Penulis. Terima kasih itu, kami sampaikan kepada Prof. Fazi Djajal, Ph.D. Berbagai pertemuan yang Penulis ikuti sejak beliau menjadi Dirjen PLS, Dirjen PMPPTK, Dirjen Dikti hingga menjadi wakil Kemendiknas RI. Selain itu, beberapa tulisan beliau, telah memberikan gambaran tentang bagaimana idealnya pendidikan ini harus dikelola. Selanjutnya, kepada Prof. Dr. Mohammad Dimiyati, Prof. Dr. Suharjono, dan Prof. Dr. I. Nyoman Sudana Degeng, yang

ketiganya merupakan guru besar di Universitas Negeri Malang (UM). Demikian pula terima kasih yang sama kami sampaikan kepada Prof. Dr. Santosa Murwani, Prof. Dr. Hasan Wainono, Prof. Dr. Mujayanah Sutikno, Prof. Dr. Djajal, Prof. Dr. Aceh Suryadi, Prof. Dr. H. A. R. Tilaar, Prof. Dr. Cony Semiawan. Semuanya merupakan Guru Besar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Beliau-beliau ini banyak berjasa dalam membagi ilmu pengetahuan melalui berbagai mata kuliah sewaktu penulis mengikuti program Doktorat di UNJ. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Atwi Suparman dan Prof. Dr. Tien Belawati, yang merupakan Guru Besar di Universitas Terbuka (UT). Penulis banyak berdiskusi terutama ketika penulis menjadi Kepala Universitas Terbuka di Gorontalo selama empat tahun.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Nani Tuloli dan Prof. Dr. Mansur Pateda, yang merupakan mantan pimpinan Universitas Negeri Gorontalo (UNNG). Ketika itu, Penulis menjadi Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana UNG, penulis banyak berdiskusi mengenai penulisan buku ini karena buku ini berkaitan dengan salah satu mata kuliah Landasan Pendidikan di Program Pascasarjana. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Nelson Pomalingo, yang saat beliau menjabat Rektor UNG selama dua periode, penulis dipercaya menjadi Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan UNG, dan saat itu penulis banyak menemukan berbagai hal yang perlu dibenahi dalam mengelola pendidikan bukan saja di perguruan tinggi, melainkan juga di pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Pada era Prof. Dr. Nelson Pomalingo ini, penulis juga mendapatkan pengalaman berharga mengenai terjadinya pergeseran makna etika dalam pendidikan yang diperhatikan mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa menyelesaikan masalah tidak dengan berdiskusi, seminar atau lokakarya, tetapi dilakukan melalui demonstrasi.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Prof. Dr. Yosep Paramata, Prof. Dr. Hassanuddin, Prof. Dr. Sarson Pomalato, Prof. Dr. Evie Hulukati, Prof. Dr. Mahludin Baruadi, Prof. Hariadi Said, Prof. Dr. Yasin Tuloli, Prof. Dr. Kadim Masang, Prof. Dr. Moon Otoluwa, Prof. Dr. Abd Harris Panal, Prof. Dr. Ramli Utina, dan Prof. Dr. Nurhayati Abas, yang merupakan kolega penulis dan tim pengajar di Program Pascasarjana UNG. Selain itu, ucapan terima kasih, juga penulis sampaikan kepada Michael Calvano, Ph.D., Prof. Dr. T.R. Andi Lolo, Ph.D.,

Dr. Subaer, Ph. D., dan Dr. Cut Kamari Wardani, yang merupakan tokoh-tokoh pelaku program USAID-DBE2 Decentralized Basic Education, ketika Penulis bersama-sama mengelola program ini sebagai CPU di UNG terutama program ALFHE yang meliputi ALLS (Active Learning In School) dan ALIHE (Active Learning In Higher Education).

Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak penerbit Bumi Aksara Jakarta, yang telah menerbitkan buku karya Penulis, antara lain: (1) *Perencanaan Pembelajaran*; (2) *Model Pembelajaran*; (3) *Teori Motivasi dan Pengukurannya*; (4) *Profesi Kependidikan*; (5) *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*; (6) *Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran*; (7) *Teknologi Informasi dan Informasi Pembelajaran*; (8) *Belajar dengan Pendekatan PALIKEM*; (9) *Asesment Pembelajaran*; (10) *Menjadi Penelitian PTK yang Profesional*; (11) *Profesi Kependidikan*; (12) *Teori Kinerja dan Pengukurannya*; dan (13) *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Kajian & Analisis di Bidang Pendidikan*. Buku-buku tersebut banyak digunakan sebagai referensi untuk mata kuliah yang berkaitan dengan pembelajaran khususnya bagi perguruan tinggi LPTK. Penulis berharap dengan referensi yang telah diterbitkan Bumi Aksara, pendidikan dan pembelajaran di Indonesia makin ditata sehingga kualitas pendidikan Indonesia yang diharapkan dapat terwujud.

Gorontalo, Awal Juli 2016



## DAFTAR ISI

**Prakata** .....

**Bab 1 Pentingnya Landasan Pendidikan**.....

- A. Pendahuluan .....
- B. Perkembangan Iptek, Jangan Menggeser Makna .....
- C. Pendidikan, Jangan Melahirkan Manusia yang Merasa Pintar, Tapi Tidak Pintar Merasa .....
- D. Pendidikan Membawa Perubahan yang Abadi .....
- E. Dampak dari Perkembangan Iptek .....
- F. Pendidikan Mempersiapkan Anak Bisa Hidup .....
- G. Perlu Disiapkan Lingkungan Belajar yang Kondusif .....
- H. Virus Keseragaman di Dunia Pendidikan .....
- I. Gambaran Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Kita .....
- J. Bercermin pada Negara yang Berhasil Pendidikannya .....
- K. Sembilan Kesalahan Arah Proses Pendidikan .....
- L. Pendidikan Perlu Dikelola secara Profesional .....
- M. Tujuan Kajian .....
- N. Kesimpulan .....

**Bab 2 Hakikat Manusia dan Pengembangannya dalam Pendidikan** .....

- A. Pendahuluan .....
- B. Sifat Hakikat Manusia .....
- C. Dimensi Manusia sebagai Bagian dalam Pendidikan .....
- D. Pengembangan Dimensi Hakikat Manusia .....

E. Sosok Manusia Indonesia Seutuhnya .....	23
F. Faktor-Faktor Pendidikan .....	27
G. Pendidikan sebagai Sistem .....	36
H. Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal sebagai Se- buah Sistem .....	37

**Bab 3 Pendidikan dan Kebudayaan (Suatu Telaah Peran Pendi-  
dikan yang Mengindonesia)** .....

A. Pendahuluan .....	38
B. Sekolah sebagai Pusat Kebudayaan .....	39
C. Jenis-Jenis Kebudayaan di Indonesia .....	44
D. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia .....	52
E. Sekolah sebagai Pusat Kebudayaan .....	65
F. Peranan Guru dalam Menciptakan Sekolah sebagai Pusat Kebudayaan .....	69
G. Peranan Guru dalam Perubahan Masyarakat .....	70

**Bab 4 Landasan Psikologi Pendidikan** .....

A. Pendahuluan .....	73
B. Dasar Psikologi Pendidikan .....	74

**Bab 5 Landasan Sosiologi Pendidikan** .....

A. Pendahuluan .....	88
B. Dasar Sosiologi Pendidikan .....	88

**Bab 6 Landasan Antropologi Pendidikan** .....

A. Pendahuluan .....	102
B. Dasar Antropologi Pendidikan .....	103
C. Pengaruh Lingkungan terhadap Masyarakat .....	105
D. Sistem Nilai Budaya .....	106
E. Implikasi Pendidikan yang Berlandaskan Antropologi di Indonesia .....	111

**Bab 7 Landasan Budaya Pendidikan** .....

A. Pendahuluan .....	116
B. Dasar Landasan Budaya dalam Pendidikan .....	116
C. Konsep Normatif .....	127
D. Faktor Budaya dalam Pendidikan .....	128

**Bab 8 Landasan Ekonomi Pendidikan** .....

A. Pendahuluan .....	133
B. Dasar Ekonomi Pendidikan .....	134

**Bab 9 Landasan Teknologi dalam Penyelenggaraan Pendidikan** .....

A. Pendahuluan .....	150
B. Pengertian Teknologi Pendidikan .....	152
C. Teknologi dalam Pendidikan .....	152
D. Teknologi dari Pendidikan .....	153
E. Mengapa Teknologi dalam Pendidikan Sangat Penting? .....	154
F. Penerapan Teknologi Pendidikan di Masa yang akan Datang (Kondisi Idealnya) .....	156
G. Peranan Komputer dalam Bidang Pendidikan .....	158
H. Peranan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TKI), serta Internet dalam Bidang Pendidikan .....	160
I. Implementasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TKI) di Bidang Pendidikan .....	161

J. Bagaimana Guru Memanfaatkan Teknologi Pendidikan? .....

K. Mengapa Guru Perlu Media Pembelajaran? .....

L. Mengapa Guru (Tidak) Menggunakan Media? .....

**Bab 10 Landasan Psikologi Komunikasi dalam Pelaksanaan  
Pendidikan** .....

A. Pendahuluan .....	168
B. Deskripsi Komponen Komunikasi dan Komponen Psiko- logi dalam Proses Pembelajaran .....	168
C. Sintesis dari Aspek Komponen Komunikasi dan Komponen Psikologis dalam Pembelajaran, serta Penemuan Prinsip .....	178

**Bab 11 Pendidikan dan Kelas-Kelas Sosial** .....

A. Pendahuluan .....	190
B. Kelas-Kelas Sosial .....	198
C. Konsep Kelas Sosial .....	198
D. Struktur Sosial dan Cara-Cara Perubahannya .....	207
E. Kepentingan Kelas-Kelas dan Perjuangan Kelas .....	216
F. Bentuk-Bentuk Perjuangan Kelas dan Organisasi .....	219

<b>Bab 12</b>	<b>Merekonstruksi Masyarakat dan Kebudayaan Melalui Perubahan Sistem Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah.....</b>	<b>227</b>
A.	Pendahuluan .....	227
B.	Misi Pendidikan Persekolahan .....	228
C.	Sekolah-Sekolah di Daerah sebagai Sarana Rekonstruksi Masyarakat.....	230
D.	Perlu nya Paradigma Pendidikan/Pembelajaran .....	231
E.	Hasil Pendidikan (Sekolah) di Daerah Dewasa Ini .....	232
F.	Pengaruh Eksternal dan Internal dalam Pengelolaan Pendidikan di Daerah.....	233
G.	Pendidikan Sekolah di Daerah dengan Sistem Desentralisasi ..	235
H.	Program Kegiatan yang Perlu di Kedepankan .....	237
<b>Bab 13</b>	<b>Merekonstruksi Masyarakat dan Kebudayaan Melalui Pendidikan di Keluarga .....</b>	<b>243</b>
A.	Pendahuluan .....	243
B.	Misi Pendidikan Persekolahan .....	244
C.	Sekolah-Sekolah di Indonesia sebagai Sarana Rekonstruksi Masyarakat.....	246
D.	Peran Keluarga dalam Pendidikan.....	247
E.	Perkembangan Pendidikan Keluarga, Masyarakat, dan Kebudayaan .....	251
F.	Keluarga sebagai Sarana Rekonstruksi Masyarakat dan Kebudayaan .....	253
G.	Hasil Pendidikan (Sekolah) di Indonesia Dewasa Ini.....	254
<b>Bab 14</b>	<b>Gerakan Membangun Kualitas Pendidikan .....</b>	<b>256</b>
A.	Pendahuluan .....	256
B.	Meningkatkan Kualitas Guru .....	260
C.	Mengembalikan Guru .....	260
D.	Mentalitas dan Vitalitas .....	262
E.	Standar Profesional Guru .....	263
F.	Kualitas dan Karier .....	263
G.	Dimensi Mengajar .....	264
	<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>267</b>
	<b>Profil Penulis .....</b>	<b>277</b>



## BAB 1

### PENTINGNYA

### LANDASAN PENDIDIKAN

#### A. PENDAHULUAN

Dalam suatu kesempatan ketika memberikan kuliah pada mahasiswa Program Pascasarjana, penulis terlibat diskusi mendalam dengan mahasiswa tentang banyaknya lulusan lembaga pendidikan yang belum mampu mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang mereka terima saat belajar dulu. Kami juga menganalisis mengapa ketika akses pendidikan telah terbuka hingga ke daerah terpencil, tidak membuat masyarakat bangsa kita mampu mengelola sumber daya alam (SDA) dengan baik. Mengapa pula perilaku dan karakter masyarakat bangsa kita telah jauh dari nilai-nilai keindonesiaan yang penuh dengan keramahan, kerendahan hati, bahkan saling bergotong royong dalam membantu sesama ketika pendidikan belum maju seperti sekarang ini? Demonstrasi terjadi di mana-mana. Tawuran pelajar terjadi juga di mana-mana, dan bahkan yang sungguh mengerikan adalah produk pendidikan kita melahirkan manusia yang tidak lagi merasa malu. Sebagian mahasiswa mengemukakan bahwa pendidikan Indonesia telah maju, tetapi jauh dari nilai-nilai keindonesiaan yang merupakan warisan nenek moyang bangsa kita. Sebagian lagi mengemukakan bahwa ada yang salah dalam pendidikan c Indonesia sehingga yang tampak adalah kehidupan masyarakat yang sudah semrawut.

Mungkin ini adalah fakta yang tampak di hadapan kita, yaitu sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa kita telah terjebak pada suatu era di mana telah mengesampingkan: (1) nilai ketuhanan yang mendorong seseorang

takut melakukan kesalahan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya; (2) nilai identitas yang mendorong jati diri sebagai suatu bangsa yang bermartabat; (3) nilai intelektual yang mendorong individu menjadi seseorang yang memiliki kecerdasan dalam kebijaksanaan; (4) nilai etika yang mendorong kehidupan penuh dengan kesopanan; (5) nilai susila yang mendorong individu taat dan patuh pada tradisi dan aturan yang berlaku di masyarakat; dan (6) nilai sosial yang mendorong individu tidak mau hidup serakah, tetapi ingin bersama-sama dalam melakukan kebaikan sehingga memiliki martabat sosial yang dipraktikkan dengan saling menghargai dan kasih sayang antarsesama. Semua nilai ini telah jauh dari kehidupan manusia Indonesia sehingga tata kehidupan masyarakat bangsa ada dalam suatu era yang sangat cocok disebut dengan "kesemrawutan" bahkan dapat dikatakan kita telah sengaja menasibkan kehidupan yang diberikan label "Kesemrawutan Global".

Apa yang dimaksud dengan kesemrawutan global ini? Inilah satu tema sekaligus problem sentral yang saat ini mengurita di setiap lorong kehidupan masyarakat dunia tanpa kecuali, mulai dari kota-kota *metropolitan* hingga dusun-dusun *metrogulita*, tak terkecuali di ruang-ruang lobi Parlemen Amerika, bahkan sampai ke raki-raki kumuh kaum Toroslaje di Popayato.<sup>1</sup>

Pertanyaannya adalah dari mana harus mengurai benang kesemrawutan ini? Dengan tidak bermaksud menyederhanakan persoalan dan pula tidak berkehendak mendiskreditkan eksistensi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai cita rasa dan cipta karsa tertinggi peradaban manusia, semoga tidak berlebihan jika pada kesempatan ini, penulis mengatakan bahwa di sinilah awal mula akses sekaligus akses *peradaban* versus *ketidakberadaban* dunia.

Betapa tidak, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan segenap umat manusia pada suatu tatanan yang seolah tanpa tapal batas. Ruang dan waktu terus menggeliat dalam dinamika yang kian mengglobal. Perubahan demi perubahan terus terjadi sehingga nyaris tidak satu pun sudut di belahan bumi yang luput dari 'aroma' ketidakpastian. Itulah sebabnya, mungkin tidak keliru jika di banyak kesempatan, orang

'menasibkan' bahwa *perubahan* dan *ketidakpastian* adalah dua dimensi yang akan senantiasa abadi dan mewarnai jalannya peradaban manusia dan alam semesta.

Disadari atau tidak, dimensi *perubahan* dan *ketidakpastian*, di samping sebagai potret sukses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sekaligus merupakan 'penampakan' seram ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dengan kata lain, dalam banyak sisi, iptek telah mampu mengantarkakan manusia pada tataran harkat dan martabat tertinggi sebagai makhluk individu, makhluk sosial, serta makhluk Tuhan. Akan tetapi, juga tidak dapat dipungkiri bahwa segenap *kesemrawutan* yang saat ini menelingkup tatanan kehidupan masyarakat global, adalah bias dari 'perselingkuhan' sesaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedianya berkehendak untuk kemaslahatan hidup umat manusia tidak jaran justru berbalik menjadi sarana pemberangusan dan pembantaian manusia dan kemanusiaan, baik secara konotatif maupun denotatif.

## B. PERKEMBANGAN IPTEK, JANGAN MENGESER MAKNA

Fakta empiris yang tak terbantahkan membuktikan bahwa bertimbur-timbur dan berlapisnya benang kejahatan yang merajut jaring kesemrawutan, justru terangkai dari "segelintir" manusia yang tidak berkhidmat pada kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Tampaknya kebenaran ilmu pengetahuan sebagai unsur perekat jati diri manusia mengalami pergeseran makna.

Tak heran jika halaman-halaman koran, layar-layar kaca televisi bahkan perjumpaan kasat mata hampir tidak pernah kering dari percikan daratan ledakan bom dan senjata mesin otomatis, rintihan korban perkosaan, pecandu narkoba, kekacauan di daerah pengungsian akibat bantuan yang tidak merata, dan lain-lain. Kita pun menjadi tidak lagi tercengang takkai ketidakbenaran diputarbalikkan sehingga mengalahkan kebenaran. Keadilan menjadi komoditas. Kebaikan menjadi barang antik. Keikhlasan menjadi kamufase. Keluarangan dan persaudaraan menjadi samar sehingga realita kehidupan menjalani definisi ganda.

<sup>1</sup> Toroslaje adalah salah satu desa di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, suku yang bergiani dan bermukim di tengah-tengah laut yang kedalaman lautnya sekitar 3-10 m dan mereka telah saba hidup di perahu, meskipun rumah mereka dibangun di atas air laut.

### C. PENDIDIKAN, JANGAN MELAHIRKAN MANUSIA YANG MERASA PINTAR, TAPI TIDAK PINTAR MERASA

Charles Darwin menyatakan bahwa perwujudan manusia modern adalah pen-  
jelmaan perlahan dari kera yang berjalan tegak, yang disebut oleh Daniel  
Goleman dengan hilangnya 'amigdala'. Amigdala ketika di dalam otak manusia  
terdapat sebuah jaringan syaraf terkecil yang merupakan sensor segala  
rasa, seperti senang, sedih, marah, kasih sayang, dan sebagainya, yang jika  
terganggu apalagi hilang amigdala tersebut, matilah segala rasa itu. Menurut  
Goleman, bahwa kasus ini pernah terjadi pada seorang pasien di Amerika,  
ketika dilakukan operasi otak tanpa sengaja amigdalanya ikut terangkat oleh  
tim dokter operasi, akibatnya sang pasien pun akhirnya kehilangan rasa.

Dalam konteks kehidupan pendidikan, betapa mengerikan jika kasus  
kehilangan amigdala ini terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat, apa-  
lagi jika tragedi itu menyerang kelompok elit birokrasi, mungkin jadinya mirip  
dengan kondisi saat ini yang penuh kesemrawutan. Begitu banyak orang yang  
*merasa pintar*, namun *tidak pintar merasa*; *merasa benar*, namun *tidak benar  
merasa*; dan *merasa waras*, namun *tidak waras merasa*.

### D. PENDIDIKAN MEMBAWA PERUBAHAN YANG ABADI

Di tengah kesemrawutan yang nyaris tak termaknai seperti disentil di atas,  
berbagai kajian mulai dihadapkan pada suatu realitas yang absurd bahkan  
cenderung *klise*. Manusia boleh saja membuat berbagai prakiraan atau  
prediksi, namun akurasi dari prakiraan atau prediksi tersebut menjadi tidak  
bisa dijamin. Fakta membuktikan bahwa tidak sedikit prakiraan yang sedianya  
dikultuskan sebagai suatu *megatrends*, akhirnya mentah dilindas oleh roda  
ketidaktastian. Misalnya, Jhon Naisbit dengan abad kebangkitan Asia-nya  
termasuk Indonesia yang siap menjadi *macan ekonomi baru*, yang ternyata  
harus berkeping di karang moneter pada pertengahan tahun 1997, Michael  
Gorbachev dengan *Glasnot Perestroika-nya*, yang harus ikhlas menerima  
kenyataan runtuhnya Uni Sovyet.

Sekelompok fakta di atas, sekali lagi menjadi pengabsah bahwa sesuatu  
yang pasti hanyalah perubahan atau *change* itu sendiri. Perubahan terjadi secara  
terus-menerus dalam skala dan intensitas yang kian meninggi, khususnya

dalam dua, tiga dekade terakhir ini. Pendorong utama dari perubahan ini adalah  
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang sangat pesa-  
dalam pemahaman kita tentang dunia diterapkan dan dikembangkan secara  
cepat dan meluas dalam berbagai bidang. Akibatnya rencana yang dibuat  
tahun ini untuk dilaksanakan dua-tiga tahun ke depan, mungkin tidak relevan  
lagi dengan kondisi yang terjadi saat itu.

### E. DAMPAK DARI PERKEMBANGAN IPTEK

Kita berada di milenium III, suatu era dengan tuntutan yang lebih rumit dan  
menantang. Suatu era dengan spesifikasi tertentu yang ternyata sangat besar  
pengaruhnya terhadap dunia pendidikan dan lapangan kerja. Perubahan  
perubahan yang terjadi selain perkembangan teknologi yang sangat pesat  
juga diakibatkan oleh perkembangan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan  
psikologi, dan transformasi nilai-nilai budaya. Dampaknya, antara lain perubahan  
cara pandang manusia terhadap manusia, cara pandang terhadap pendidikan  
perubahan peran guru, peran dosen, serta perubahan pola hubungan  
antarmereka. Banyak orang tua, guru, dosen tidak siap menghadapi perubahan  
tersebut, ketika sebagian berpacu dengan perubahan, sebagian yang lain justru  
cenderung menjadi penonton saja, dengan risiko ditinggalkan oleh perubahan  
itu.

### F. PENDIDIKAN MEMPERSIAPKAN ANAK BISA HIDUP

Perubahan memang terjadi dengan sangat cepat dan gerakannya tidak  
linier, tetapi terjadi lompatan-lompatan yang sangat sulit diramalkan. Ketika  
para guru dan dosen telah terbiasa dengan pandangan masa lalu tentang  
pendidikan, kini berhembus badai reformasi yang mengguncang pola pikir  
manusia Indonesia.

Perubahan ini sebenarnya disebabkan karena adanya tuntutan perubahan  
arah dan pola tujuan pendidikan, serta strategi untuk mencapainya. Untuk itu  
pendidikan tidak lagi dilihat sebagai upaya menyiapkan anak untuk memasuki  
masa depan, tetapi sebagai suatu proses agar seseorang bisa "hidup" kapan  
pun, dimana pun, dan dalam situasi apa pun. Oleh karena itu, tujuan yang

terpenting dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan mental yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Jadi, belajar itu sendiri yang menjadi tujuan pendidikan, bukan semata-mata pada hasil belajarnya. Identifikasi berikut ini merupakan karakteristik manusia yang urgen dimunculkan melalui proses pendidikan dan perlu dipertimbangkan dalam mendesain pembelajaran.

Sumber daya manusia yang bisa "hidup", dalam arti mampu bersaing di era kesemrawutan global adalah manusia yang benar-benar unggul. Manusia unggul yang dimaksud adalah manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh manusia yang disebut unggul adalah (1) berpikir kreatif-produktif; (2) pengambilan keputusan; (3) pemecahan masalah; (4) belajar bagaimana belajar; (5) kolaborasi; (6) pengelolaan pengendalian diri atau kecerdasan emosional.

Oleh karena itu, tujuan pendidikan/kurikulum pembelajaran dan strateginya harus mengarah ke pembentukan kompetensinya, yaitu menghasilkan manusia yang bisa "hidup" dengan memberi peluang kepada setiap siswa atau mahasiswa dapat mengalami *growth in learning*. Satu unsur penting yang berkaitan dengan strategi pendidikan/pembelajaran ini adalah bagaimana menata lingkungan belajar benar-benar merupakan aktivitas yang mengairahkan bagi siswa atau mahasiswa.

### G. PERLU DISIAPKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG KONDISIF

Lingkungan belajar, bagaimanapun penataannya, dimaksudkan agar anak mau dan mudah belajar. Salah satu karakteristik dan penataan lingkungan seperti ini dengan melibatkan mereka sebagai subjek yang belajar. Pelembutan mereka membawa implikasi yang besar karena terkandung suatu pemikiran reformatif tentang bagaimana memperlakukan siswa atau mahasiswa sehingga tercipta belajar dalam dirinya.

### H. VIRUS KESERAGAMAN DI DUNIA PENDIDIKAN

Penulis mengidentifikasi beberapa virus yang ada di sekolah dan perguruan tinggi yang bersumber dari paradigma keteraturan, seperti penggunaan

(1) kurikulum yang seragam (kurikulum nasional); (2) strategi pembelajaran yang seragam; (3) buku sumber yang seragam; dan (4) strategi evaluasi yang seragam. Penyeragaman ini sudah pasti memberi kontribusi pada pemerataan keragaman.

Semua bentuk penyeragaman ini, ternyata telah berhasil membentuk siswa/mahasiswa Indonesia menghargai kesamaan, dan tanpa sadar telah berhasil membentuk pengabdian pada keragaman. Hal ini justru membuat perilaku yang berbeda lebih dilihat sebagai kesalahan yang harus dihukum.

Mungkin perlu kita melakukan pengkajian ulang, atau dengan ungkapan yang lebih memasyarakat akhir-akhir ini, kita perlu melakukan reformasi, redefinisi, dan reorientasi terhadap landasan teoretik dan konseptual belajar-pembelajaran, dan kurikulum yang lebih mampu menumbuhkan/embangkan anak-anak bangsa lebih menghargai keragaman. Di sinilah teknologi pembelajaran perlu mengambil peran lebih aktif dalam mendeskripsi persoalan pembelajaran dan menemukan pemecahannya.

### I. GAMBARAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PENDIDIKAN KITA

Jika kita renungi masalah pembangunan pendidikan di Indonesia, sungguh mengundang kita semua untuk mencermati betapa pendidikan di Indonesia baru sekedar mampu memberikan dampak langsung pendidikan yang diwujudkan dengan ijazah. Akan tetapi, belum sampai memberikan dampak pengiring pengajaran yang indikatornya adanya kemampuan daya saing sumber daya manusia (SDM) baik untuk memenuhi tuntutan dunia usaha maupun tuntutan dunia industri, apalagi persaingan dalam kancah percaturan dunia.

Beberapa hasil survei dan riset yang dilakukan lembaga dunia yang kredibelnya dapat dipertanggungjawabkan menggambarkan bahwa kredibilitas bangsa Indonesia di mata masyarakat dunia tidak semakin memuncak, tetapi justru semakin memudar dalam beberapa tahun terakhir ini. Berbagai publikasi yang dikeluarkan oleh organisasi Internasional, baik lembaga formal seperti Bank Dunia maupun lembaga non formal seperti LSM, telah memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai hal tersebut.

Secara umum, indikator yang menunjukkan rendahnya mutu pendidikan Indonesia dapat dilihat dari data Rencana Strategis Depdiknas tahun 2005–2009

tentang Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang mengalami penurunan sejak tahun 1995, yaitu peringkat ke-104 pada tahun 1995, peringkat ke-109 pada tahun 2000, peringkat ke-110 pada tahun 2002, peringkat ke-112 pada tahun 2003, dan sedikit membaik pada peringkat ke-111 pada tahun 2004, dan peringkat ke-110 pada tahun 2005.

Dalam hal pendidikan juga demikian. Hasil studi, *Political and Economical Risk Consultancy (PERC)* pada tahun 2001, mendudukkan Indonesia di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Dalam hal ini, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, dan sebagainya, lagi-lagi berada di atas kita. Artinya, bahwa kondisi pendidikan Indonesia tidak saja terpuruk di tingkat dunia, melainkan bahkan di tingkat Asia pun kita tidak bisa berbuat banyak karena hanya menempati posisi ke-12 dari 12 negara, atau berada pada urutan terakhir. Fakta ini memang merupakan sesuatu yang sangat ironis bahkan tragis. Betapa tidak, setelah lebih dari setengah abad perjalanan negeri ini, tatkala bangsa-bangsa lain sudah mulai menikmati hasil-hasil SDM sebagai produk dari sistem pendidikan yang bermutu, ternyata bangsa Indonesia justru masih sibuk mewacanakan seperti apa pendidikan yang bermutu itu?

Dari segi ekonomi, mungkin kita masih ingat dengan satu publikasi yang dikeluarkan oleh, *International Institute for Management Development (IIMD)* (2001), suatu organisasi internasional yang bermarkas di Kota Lausanne, Swiss, tentang peringkat daya saing ekonomi sejumlah negara. Dari sebanyak 49 negara yang disusun dalam sistem keperingkatan, ternyata Indonesia berada pada posisi paling rendah, yaitu peringkat ke-49. Negara-negara tetangga kita seperti Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Korea Selatan semua memiliki peringkat di atas kita. Hal itu berarti bahwa daya saing ekonomi kita memang paling lemah di antara negara-negara dunia pada umumnya, termasuk negara-negara tetangga.

Kalau dicermati publikasi *World Bank (WB)*, *UNDP*, *Unesco*, *Usaid*, *Asia Week*, dan badan-badan Internasional lainnya; hampir tidak ada yang dapat menjelaskan prestasi terbaik bangsa kita di bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang-bidang lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini.

Pertanyaannya adalah mengapa posisi Indonesia kalah bersaing baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya dalam pembangunan? Jawabannya tentu banyak variabel yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

Mungkin banyak yang menjawab, bahwa kurangnya daya saing bangsa ini karena keterpurukan bangsa kita secara politik, ekonomi, atau sosial budaya. Banyak orang yang menyatakan bahwa itu semua disebabkan terjadinya badai krisis yang menghantam sistem perekonomian Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu. Berawal dari sinilah selanjutnya aneka krisis muncul di permukaan.

Analisis seperti itu tentu tidak salah, tetapi mendudukkan krisis ekonomi sebagai satu-satunya determinan tentu tidak tepat. Apabila kita telaah lebih dalam, sebenarnya ada faktor yang lebih fundamental sebagai penyebab keterpurukan kita, yaitu ketidakberhasilan pendidikan nasional kita. Karena pendidikan kita tidak menghasilkan SDM bangsa yang berkemauan tulus dan berkemampuan profesional maka kita tidak sanggup menahan krisis; dan ketika aneka krisis sudah berkecamuk yang mengantar kita dalam keterpurukan maka kita pun sulit untuk melakukan perbaikan.

## **J. BER CERMIN PADA NEGARA YANG BERHASIL PENDIDIKANNYA**

Kita dapat belajar dari Australia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan sebagainya; ketika badai krisis menyerang negara-negara Asia, mereka tetap saja *survive*. Mengapa? Karena mereka memiliki generasi yang tangguh untuk melawan krisis. Ketangguhan ini merupakan dampak positif dari pelaksanaan pendidikan nasionalnya.

Kita juga bisa dan perlu belajar dari Malaysia dan Thailand. Seperti kita ketahui, kedua negara ini sempat juga dihantam krisis dalam waktu yang bersamaan dengan Indonesia. Akan tetapi, pelan-pelan namun pasti kedua negara tersebut mampu memperbaiki diri. Sementara sekarang kita masih asyik bergelut dengan aneka macam krisis dan keterpurukan, mereka sudah terbebas dari itu semua. Mengapa? Karena mereka mempunyai generasi yang tangguh untuk melawan krisis. Ketangguhan ini merupakan dampak positif dari pelaksanaan pendidikan nasionalnya.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah pendidikan kita belum memberikan andil? Jawaban sesungguhnya adalah: hari ini kita sedang menuai dampak jangka panjang atas ketidakberhasilan pendidikan. Kekurangtangguhan bangsa

Indonesia hari ini merupakan akibat dari perjalanan pendidikan 20 sampai dengan 25 tahun yang silam. Selama ini kita kurang bersungguh-sungguh mengurus pendidikan dan hari ini kita tengah menuai dampaknya.

## K. SEMBILAN KESALAHAN ARAH PROSES PENDIDIKAN

Apabila dikaji, setidaknya terdapat sembilan kesalahan arah proses pendidikan: *Pertama*, keberhasilan pendidikan hanya diukur dari keunggulan ranah kognitif dan nyaris tidak menghiraukan ranah afektif dan psikomotorik. *Kedua*, evaluasi pendidikan terutama pengajaran di tingkat sekolah cenderung mengesampingkan pola berpikir konvergen. Akibatnya, siswa tidak dipacu berpikir kreatif, imajinatif, dan inovatif. *Sebaliknya*, mereka malah menjadi objek didik dan bukan pelaku aktif. *Ketiga*, proses pendidikan berubah menjadi proses pengajaran. Artinya, materi pelajaran menjadi materi yang tidak terasa relevansinya dengan kenyataan. Salah satunya adalah terjadinya kesenjangan dunia sekolah dan dunia kerja.

*Keempat*, kemampuan menguasai pengetahuan tidak disertai dengan pembinaan kegemaran belajar. Akibatnya, lembaga elit yang jauh dan asing bagi kehidupan dan keperluan hidup sehari-hari. *Kelima*, titel dan gelar menjadi target pendidikan yang tidak disertai dengan tanggung jawab ilmiah yang mumpuni sehingga terjadi 'pengajaran titel' yang tidak sehat. Kultur lembaga pendidikan menjadi kultur serimonial dan sangat bernuansa status. *Keenam*, materi pendidikan dan buku pelajaran ditulis dengan cara dan metode untuk menyeimbangkan faktor praktik dan teori, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan takwa, faktor lembaga pendidikan dan dunia kerja, faktor menjawab benar-salah dan menjawab dengan membuka kemungkinan variatif.

*Ketujuh*, manajemen pendidikan yang menekankan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah dan bukan kepada seluruh *stakeholders* pendidikan seperti masyarakat, orang tua, guru, dan siswa itu sendiri. *Kedelapan*, profesi guru yang terkesan menjadi profesi ilmiah saja dan kurang disertai dengan bobot profesi kemasyarakatan sehingga hubungan guru dan murid terkesan sebagai hubungan produsen dan konsumen. Hal ini diperparah dengan kedudukan profesi guru yang belum terajut dengan

kaidah-kaidah akademik dengan berdasar pada keilmuan tertentu. Sudah kaatnya setiap guru harus mengajar bidang studi. *Kesembilan*, semuanya in diikuti dengan problem nasional yang multi dimensional, yang melemahkan upaya pemerataan pendidikan yang kurang didukung oleh sarana-prasarana yang memadai, serta lemahnya *political will* pemerintah yang menempatkan anggaran dan isu pendidikan menjadi tidak populer.

Masalah lainnya yang juga urgen untuk menyangkut pendidikan nasional antara lain (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara perkotaan dan pedesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KT) dan kawasan bara Indonesia (KBJ).

## L. PENDIDIKAN PERLU DIKELOLA SECARA PROFESIONAL

Seorang yang disebut pendidik profesional bukan sekadar merupakan pekerjanya teknis dengan pemikiran mikro semata, melainkan juga memahami konsep dan kaidah-kaidah yang harus dipahami dan disikapi secara profesional pula. Laju perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang menanda abad sekarang, dan terlebih di masa-masa mendatang, menghajatkan para pendidik profesional yang andal, yang dapat merasionalkan tugas dan fungsinya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, baik dari bidang kajian ilmu yang ditekuni maupun ilmu-ilmu lain yang bersifat membantu. Dengan demikian seorang pendidik profesional bukan sekadar tahu bagaimana mengerjakan tugas-tugas dan fungsinya, melainkan secara kritis dituntut untuk menjawab persoalan.

Pendidikan sebagai proses dan gejala, tidak berada dalam kehampaan bukan mengada dengan sendirinya. Pendidikan bersinggungan dengan manusia sebagai subjek pelaku dan penerima, sebagai yang memengaruhi dan dipengaruhi. Oleh karena itu, dalam memahami pendidikan dapat tidak menuntut pemahaman yang memadai tentang manusia dengan berbagai

diri generik dan uniknya. Dalam perspektif ini, kaidah-kaidah psikologik, sejarah, dan politik-legalistik menawarkan cakrawala pandang yang komprehensif tentang pendidikan. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih baik mengenai pendidikan tersebut, kehadiran seorang profesional dalam bidang pendidikan perlu memusatkan perhatian pada landasan pendidikan bukan saja menjadi tuntutan, melainkan dalam konteks pendidikan menjadi suatu keharusan.

## M. TUJUAN KAJIAN

Kajian pentingnya landasan pendidikan ini berupaya: (1) memberikan wawasan awal mengenai peristiwa pendidikan dengan pendekatan struktural landasan pendidikan; (2) mengetengahkan beberapa dasar pemikiran (*basic reasoning*) menggunakannya model pendekatan struktural bagi landasan pendidikan; (3) mengetengahkan konsep dasar landasan pendidikan; (4) mengetengahkan fungsi yang diemban landasan pendidikan bagi pengupayaan kebijakan dan peningkatan praktik pendidikan; (5) mengetengahkan tata sajian buku dan garis besar isi buku sehingga memudahkan pengkaji di dalam menelaah isu landasan pendidikan.

## N. KESIMPULAN

Landasan pendidikan, pada dasarnya merupakan paparan analisis kritis akan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar (*basic fact*) pendidikan. Kaidah-kaidah dan kenyataan dasar, merupakan dasar bagi upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai. Secara lebih sederhana, kaidah-kaidah tersebut merupakan dasar bagi pengembangan upaya kependidikan dalam makna luas.

Pemahaman akan landasan pendidikan akan membantu para calon/pendidik profesional untuk memikirkan persoalan ini (*essentials*) dari tugas dan fungsinya secara lebih jelas. Berbagai persoalan kritis, misalnya bagaimana mengelola "energi" atau potensi kemampuan partisipan pendidikan untuk menciptakan situasi belajar yang optimal dengan kurikulum yang disesuaikan dengan murid, bagaimana bekerja sama dengan orang tua, pengelola dan

lain-lain dalam proses pendidikan secara efektif, memerlukan landasan kaidah kaidah tertentu. Menghadapi persoalan tersebut, para pendidik dituntut memiliki penguasaan akan data, informasi dan konsep yang diemban oleh kajian landasan pendidikan.

Kajian landasan pendidikan mengetengahkan pandangan yang komprehensif tentang mengapa dan dalam situasi bagaimana peristiwa pendidikan muncul. Dengan melalui kajian landasan pendidikan, para pendidik memiliki peluang lebih besar untuk merasionalakan atau menalarakan upaya pendidikan yang dilibatnya.

Kerumitan, dinamika, dan saling keterkaitan antarperistiwa pendidikan mengakibatkan sulit berkembangnya pemahaman yang baik. Keberadaan landasan pendidikan sebagai kajian, menawarkan semacam "benang-benang merah" atau "batang peninjau" yang mempersatukan serpihan-serpihan pemahaman menjadi lebih komprehensif.

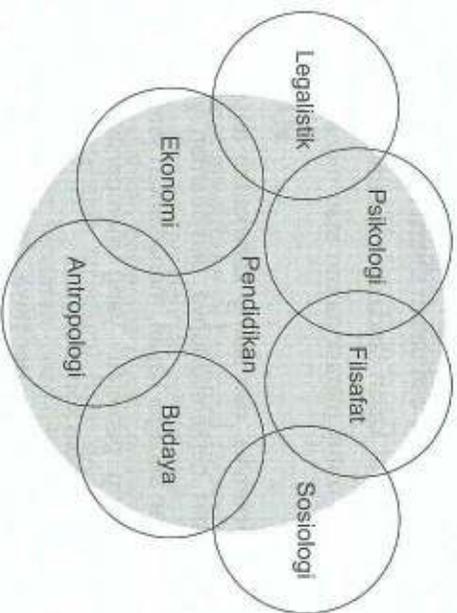
Betapa sederhana pun, peristiwa pendidikan tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan tunggal. Ini berarti bahwa setepatnya bila digunakan pendekatan terpadu multidisiplin mengenai landasan pendidikan sebagai pemandu analisis.

Secara umum, buku landasan pendidikan menyajikan seperangkat pemahaman tentang (1) konsep dasar dan fungsi landasan pendidikan; (2) berbagai sudut pandang kajian akan landasan pendidikan, yang dipadukan dalam model pendekatan struktural landasan pendidikan; (3) pendalaman penalaran tentang peristiwa pendidikan; dan (4) perluasan wawasan dalam kerangka telaah praktik pendidikan; dan (5) bagaimana melihat kemajuan pendidikan di Indonesia sehingga berbagai landasan pendidikan yang dijadikan rujukan pelaksanaannya memberikan sumbangan dalam mengembangkan kualitas pendidikan.

Di depan telah diketengahkan bahwa landasan pendidikan merupakan paparan kritis akan kaidah-kaidah dan kenyataan sebagai dasar pendidikan Kaidah-kaidah dan kenyataan dasar tersebut disarankan dari berbagai kajian yang boleh jadi dihasilkan oleh bidang keilmuan di luar pendidikan.

Ke arah pemahaman yang lebih memadai, diperlukan semacam "benang-benang merah" yang merangkai kaidah-kaidah dan kenyataan dasar

yang "berserakan". Untuk maksud ini, model pendekatan struktural landasan pendidikan merupakan alternatif yang berpeluang besar. Secara tergambar, model pendekatan struktural landasan pendidikan dapat disajikan sebagai berikut.



**Sumber:** Adaptasi dari buku Frank H. Blachinsten dan Robert, *School Society and The Professional Education*, 1968.

**Gambar Model Pendekatan Struktural Landasan Pendidikan**

Berdasarkan model pendekatan struktural landasan pendidikan tersebut, dikembangkan semacam anatomi landasan pendidikan. Anatomi landasan pendidikan ini dimaksudkan memisah-misahkan antarlendasan pendidikan, melainkan untuk memberikan peluang pada masing-masing landasan agar lebih mudah dikaji dan dikembangkan. Akan tetapi, harus selalu diingat bahwa keterpisahan antarlendasan, tidak mendukung bagi pemahaman yang menyeluruh mengenai landasan pendidikan. Peristiwa pendidikan harus selalu dipahami dalam keterkaitan, dinamika, dan kerumitannya dengan berbagai mantra kehidupan manusia selaku partisipan pendidikan.

## BAB 2

# HAKIKAT MANUSIA DAN PENGEMBANGANNYA DALAM PENDIDIKAN

### A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, manusia diciptakan untuk mengemban tugas-tugas pengabdian kepada Penciptanya. Paling tidak, agar tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik maka Sang Pencipta telah menganugerahkan manusia seperangkat potensi yang dapat ditumbuhkembangkan. Potensi yang siap pakai tersebut dianugerahkan dalam bentuk kemampuan dasar, yang hanya mungkin berkembang secara optimal melalui bimbingan dan arahan yang sejalan dengan petunjuk Sang Penciptanya.

Dengan mengacu pada prinsip penciptaan ini, menurut filsafat pendidikan bahwa manusia adalah makhluk yang berpotensi dan memiliki peluang untuk dididik. Pada dasarnya, pendidikan itu sendiri adalah aktivitas sadar berupa bimbingan bagi menumbuhkembangkan potensi Ilahiyat, agar manusia dapat memerankan dirinya selaku pengabdil Allah secara tepat guna dalam kadar yang optimal. Dengan demikian, pendidikan merupakan aktivitas yang bertahap, terprogram, dan berkesinambungan.

Banyak hal secara parsial yang bersangkutan dengan manusia sudah diketahui secara jelas dan pasti. Akan tetapi, secara utuh menyeluruh jauh lebih banyak persoalan yang belum dapat diketahui secara konkret, jelas, dan pasti. Artinya, hal-hal yang fisis kuantitatif pada umumnya sudah jelas, tetapi hal-hal yang spiritual kualitatif masih tetap tertinggal sebagai 'misteri'.

Manusia siapa pun tahu bahwa melakukan perbuatan tertentu yang mengakibatkan banyak orang sakit dan menderita adalah merusak nilai

kemusiaan. Hal ini, menunjukkan bahwa perilaku negatif seperti itu selalu mewarnai kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa pengetahuan manusia belum terhubung secara kausalistik fungsional dengan realitas konkret perilaku sehari-hari.

Dari kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku tersebut, munculah upaya untuk mempertemukannya, yaitu melalui 'pendidikan'. Sepanjang eksistensinya, manusia memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan potensi alam termasuk dirinya sendiri dan sesamanya. Di bawah kekuasaan manusia kehidupan ini berlangsung menjadi 'antroposentrik'

## B. SIFAT HAKIKAT MANUSIA

Filsafat antropologis mengkaji sifat manusia karena pendidikan adalah praktik yang berlandaskan dan bertujuan. Landasan dan tujuan pendidikan itu sifatnya filosofis dan normatif. Paham eksistensialisme mengemukakan wujud sifat hakikat manusia sebagai berikut.

### 1. Kemampuan Mengendalikan Diri

Kemampuan mengendalikan diri yang ada pada manusia merupakan kunci perbedaan antara manusia dengan hewan. Manusia dapat membedakan dirinya dengan hewan, mereka bahkan dapat mengendalikan diri dengan sekitarnya, yang non-aku berkat adanya kemampuan ini.

Dengan melalui arah ke dalam ini, aku memberi status pada lingkungan sebagai subjek yang berhadapan dengan aku sebagai objek yang pada dasarnya bermuatan pengabdian, tenggang rasa, pengorbanan, dan sebagainya. Dengan arah keluar, aku menjadikan dan memandang lingkungan itu sebagai objek, guna memuaskan dan memenuhi kebutuhan aku.

### 2. Kemampuan Bereksistensi

Kemampuan manusia menerobos dan menempatkan diri disebut kemampuan bereksistensi. Manusia berada di muka bumi dalam keadaan mengoda bukan berada seperti makhluk lain. Perbedaan manusia sebagai makhluk *human* dari hewan sebagai makhluk *infrahuman* terletak pada adanya kemampuan manusia bereksistensi.

### 3. Kata Hati

Kata hati (*conscience of man*) bisa disebut juga dengan hati nurani, pelita hat suara hati. *Conscience* adalah pengertian yang mengikhti perbuatan. Hati nurani adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan tentang baik-buruknya perbuatannya sebagai manusia.

Menurut Dirjarkara "*baik yang integral*" adalah kriteria baik/bener dan buruk/salah yang harus terkait dengan baik/bener dan buruk/salah bag manusia sebagai manusia.

### 4. Moral

Isilah moral sering disebut etika. Etika adalah perbuatan manusia itu sendiri sedangkan moral yang sinkron dengan hati nurani manusia, yaitu yang benar benar baik manusia sebagai manusia merupakan moral yang baik atau moral yang luhur.

### 5. Tanggung Jawab

Tiga wujud tanggung jawab, yaitu

- tanggung jawab kepada diri sendiri,
- tanggung jawab kepada masyarakat, dan
- tanggung jawab kepada Tuhan.

Tanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat biasanya disebut tanggung jawab yang bersifat horizontal, sedang tanggung jawab kepada Tuhan, biasanya disebut tanggung jawab vertikal. Dengan menanggung tuntutan norma-norma masyarakat adalah bukti tanggung jawab manusia kepada masyarakat. Tanggung jawab berarti keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, dan perbuatan tersebut dilakukan sehingga sanksi apa pun dituntutkan kata hati oleh masyarakat, oleh norma-norma agama diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan.

### 6. Rasa Kebebasan

Ada yang berpendapat merdeka adalah rasa bebas, tetapi rasa bebas itu sesuai dengan kodrat manusia. Kata hati dan moral mempunyai kaitan yang sanga

erat dengan kemerdekaan. Sementara itu, implikasi pendidikan di sini adalah mengusahakan agar peserta didik dibiasakan menginternalisasi nilai-nilai ke dalam diri peserta didik sehingga lama kelamaan ia merasakan bahwa hal ini sebagai miliknya.

## 7. Kewajiban dan Hak

Pada umumnya, sesuatu yang menyenangkan diasosiasikan dengan hak, sedangkan suatu beban dipandang sebagai suatu kewajiban. Akan tetapi, Dirjagara berpendapat bahwa kewajiban bukanlah beban melainkan suatu keniscayaan. Mengenai keniscayaan manusia bisa melanggar dan bisa menaatinya, bila mana hak dan kewajiban sejalan maka keadilan dapat diwujudkan. Berhubungan pemenuhan hak dan kewajiban dibatasi oleh situasi dan kondisi, berarti tidak keseluruhan hak dapat terpenuhi dan tidak keseluruhan kewajiban dapat terlaksana.

## 8. Kemampuan Menghayati Kebahagiaan

Ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan tidak cukup digambarkan hanya sebagai himpunan dari pengalaman-pengalaman yang menyenangkan saja. Akan tetapi, lebih dari itu seperti integrasi dari segenap ketenangan, kegembiraan, kepuasan, dan, sejenisnya dengan pengalaman pahit dan penderitaan. Sesungguhnya, kebahagiaan bersifat tidak irasional semata karena aspek-aspek kepribadian lain ikut serta dalam berperan, seperti akal dan pikiran. Kebahagiaan itu rupanya tidak terletak pada keadaan sendiri baik secara faktual maupun secara rangkaian prosesnya. Kebahagiaan itu pada perasaan yang dialibatkannya, yang terletak pada "kesanggupan menghayati" semuannya itu dengan keheningan jiwa dan meletakkan hal-hal tersebut dalam keadaan atau rangkaian tiga hal:

- Usaha adalah perjuangan yang terus-menerus mengatasi masalah hidup.
- Norma-norma adalah tumpuan dari usaha.
- Takdir berhubungan erat dengan komponen usaha.

Dalam upaya meningkatkan kebahagiaan, terdapat dua hal yang perlu dikembangkan, yaitu kemampuan berusaha dan kemampuan menghayati hasil usaha. Selain itu, dalam hubungannya dengan takdir, khususnya pendidikan keagamaan dapat berperan.

## C. DIMENSI MANUSIA SEBAGAI BAGIAN DALAM PENDIDIKAN

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang mendorongnya untuk berhubungan dengan sesama yang menempatkan manusia memiliki dimensi sebagai berikut.

### 1. Dimensi Manusia sebagai Makhluk Filosofis

"Homo sapiens" merupakan sebutan bagi manusia yang diartikan makhluk yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan. Munculnya ilmu filsafat karena terdorong oleh hasrat manusia yang ingin mengetahui segala sesuatu. Filsafat berasal dari kata *philos* dan *sophia* yang berarti gemar dan suka berpikir secara mendalam untuk mencapai kebijaksanaan atau pengetahuan.

Filsafat ialah ilmu yang menyelidiki sesuatu secara mendalam tentang ketuhanan, alam, dan manusia sehingga menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya sikap manusia setelah mencapai pengetahuan.

### 2. Dimensi Manusia sebagai Makhluk Individu

Setiap orang memiliki individualitasnya. Manusia sebagai individu mempunyai jiwa dan raga yang tidak dipisahkan satu sama lain di dalam perkembangannya. Dalam kegiatan pendidikan yang melibatkan individu, pendidik dituntut memberi perhatian terhadap aspirasi kognitif, efektif, dan psikomotor.

M.J. Langeveld berpendapat bahwa setiap anak memiliki dorongan untuk mandiri, terkadang di sisi lain pada anak terdapat rasa tidak berdaya sehingga memerlukan pihak lain yang dapat dijadikan tempat bergantung untuk memberi perlindungan dan bimbingan.

Sifat-sifat yang secara potensial tanpa pembinaan melalui pendidikan, benih-benih individualitas yang sangat berharga itu yang memungkinkan terbentuknya suatu kepribadian yang unik akan tetap tinggal. Fungsi pokok pendidikan adalah membantu peserta didik untuk menemukan kediriannya sendiri atau untuk membentuk kepribadiannya.

### 3. Dimensi Manusia sebagai Makhluk Sosial

"Sifat hakikat manusia adalah makhluk sosial, individualitas, dan moralitas", demikian menurut M.J. Langeveld. Setiap manusia dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung aspek saling memberi dan

menerima. Dorongan untuk bergaul pada manusia merupakan salah satu gambaran yang cukup jelas dari dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu yang berinteraksi mendorong manusia melakukan interaksi sosial.

Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia dimana tingkah laku manusia yang satu memengaruhinya, mengubah atau memperbaiki tingkah laku yang lain atau sebaliknya. Perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial termasuk perkembangan pribadi.

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan, saling menolong dan saling melengkapi. Tugas pendidikan ialah mengembangkan semua potensi sosial sehingga manusia sebagai makhluk sosial mampu berperan dan mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Maslow mengelompokkan kebutuhan bergantung pada pemusannya dan memiliki tingkatan makna yang tidak sama, serta hierarki tertentu. Adapun kebutuhan yang pemusannya sangat bergantung pada orang lain adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, memperoleh kasih sayang dan memiliki, serta kebutuhan memperoleh penghargaan. Kebutuhan yang pemusannya kurang sekali bergantung pada orang lain, tetapi semakin bergantung pada diri sendiri dan pada aspek nonmanusiawi adalah kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, serta kebutuhan estetis.

Adapun pengelompokan kebutuhan yang dikemukakan oleh Lawhead sebagai berikut.

- Kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, bernapas, perlindungan, seksual, dan kesehatan.
- Kebutuhan rohani, seperti kasih sayang, rasa aman, penghargaan, mengembangkan diri, dan mengaktualisasi diri.
- Kebutuhan menyangkut jasmani/rohani, seperti istirahat, rekreasi, dan pengembangan semaksimal mungkin potensi fisik.
- Kebutuhan sosial, seperti kebutuhan untuk dapat diterima secara wajar oleh lingkungan sosial.
- Kebutuhan yang sifatnya lebih tinggi yang merupakan tuntutan rohani yang tinggi dalam meningkatkan kebutuhan diri dengan yang abadi seperti kebutuhan terhadap agama.

#### 4. Dimensi Manusia sebagai Makhluk Susila

Susila berasal dari bahasa Jawa Kuno, yakni *Su* dan *Sila*. *Su* berarti luhur dan *Sila* berarti tingkah laku. Jadi, susila adalah tingkah laku yang luhur, sedangkan makhluk susila adalah orang yang bertingkah laku luhur dan mulia.

Salah satu cabang dari ilmu filsafat adalah ilmu kesusilaan (*ethica*). Ilmu kesusilaan bermanfaat untuk mengenal karakter manusia, menimbang antar yang baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, menjaga keseimbangan hidup individu di dalam masyarakat, mulai dari rumah tangga, tetangga, masyarakat bahkan negara.

Ada dua macam istilah yang sering digunakan dalam bahasa ilmiah yang mempunyai konotasi yang berbeda, yakni etiket (persoalan kepantasan dan kesopanan) dan etika (persoalan kebaikan). Apabila etika dianggar ada orang lain merasa dirugikan, sedangkan pelanggaran etiket hanya mengakibatkan ketidaksenangan orang lain. Kesusilaan diartikan mencakup etika dan etiket. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila, serta melaksanakannya sehingga dikatakan manusia sebagai makhluk susila.

Diyarkara SJ mengartikan manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Berdasarkan asal dari nilai-nilai itu di produk dibedakan tiga macam nilai:

- nilai otonom yang bersifat individual,
- nilai heteronom yang bersifat kolektif,
- nilai keagamaan, yakni nilai yang berasal dari Tuhan.

Ki Hadjar Dewantara mengemukakan bahwa: kesusilaan atau kehalusan budi menunjukkan sifat hidup lahir manusia yang serba halus dan indah, sedangkan adap dan keluhuran budi menunjukkan sifat batin manusia, misalnya/keinsafan tentang kesucian, kemerdekaan, keadilan, ketuhanan, kesosialan kedamaian, kesediaan, dan cinta kasih.

Pendidikan manusia susila dan manusia beradab menanamkan juga hak dan kewajiban manusia baik sebagai diri pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Perimbangan yang selaras antara *to take and to give* merupakan jaminan kesusilaan yang sehat di dalam kehidupan manusia.

Pendidikan kesusilaan berfungsi menanamkan kesadaran dan kesediaan melaksanakan kewajiban di samping hak peserta didik. Hal ini berarti pula

mengembangkan peserta didik menjadi manusia susila yang mendukung nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah di dalam kehidupan masyarakat.

### 5. Dimensi Manusia sebagai Makhluk Beragama

Kebiasaan dan sikap yang membudaya pada nenek moyang kita merupakan embrio dari kehidupan manusia dalam beragama. Setelah ada agama maka manusia mulai menganutnya. Karena itu, manusia adalah makhluk yang lemah, manusia menjadikan agama sebagai penopang utama kehidupannya.

Marten Buber berpendapat bahwa pendidikan agama seyogianya menjadi tugas orang tua dalam lingkungan keluarga. Hal ini karena pendidikan agama adalah persoalan efektif dan kata hati. Di samping itu, perlu dikembangkan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama karena kerukunan ini merupakan perekat kesatuan bangsa. Falsafah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, dalam agama Islam tercantum jelas dalam antara Alquran peran pendidikan agama terutama oleh orang tua untuk menjadikan si terdidik menjadi manusia yang bertauhid, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

## D. PENGEMBANGAN DIMENSI HAKIKAT MANUSIA

Dimensi hakikat manusia, pengembangannya merupakan tugas pendidikan karena sarana pokok bidang pendidikan itu adalah manusia. Bertalian dengan keadaan ini, ada dua kemungkinan yang akan terjadi berikut ini.

### 1. Pengembangan yang Utuh

Pengembangan yang utuh dapat dipandang dari dua segi, yaitu (a) dari segi dimensi dan arahnya; dan (b) dari segi wujud dimensinya.

Dari segi dimensinya, kebutuhan dapat terjadi antara aspek jasmani dan rohani. Di antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesuksesan, dan beragama antara aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotor.

Pengembangan hakikat manusia yang utuh dapat diberi makna sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga tumbuh dan berkembang secara harmonis. Pembentukan manusia yang utuh secara totalitas dapat diupayakan dengan pengembangan yang bersifat baik horizontal maupun vertikal.

### 2. Pengembangan yang Tidak Utuh

Pengembangan yang tidak utuh merupakan pengembangan yang bersifat patologis, yang akan memberikan dampak terbentuknya kepribadian yang pincang. Pengembangan seperti ini tidak menguntungkan dalam dunia pendidikan karena usaha pendidikan senantiasa menghendaki terbentuknya hasil kepribadian yang utuh.

## E. SOSOK MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA

Telah ditegaskan dalam strategi pembangunan nasional bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan ini merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan tertentu.

Arah dari pendidikan ini telah disusun dan diadakan perubahan setiap lima tahun yang dahulu dikenal dengan pembangunan lima tahun. Sekarang ini, strategi pendidikan didasarkan pada budaya bangsa, perkembangan teknologi, dan daya saing global di masa yang akan datang. Untuk itu, sebelum sampai pada pembahasan strategi pendidikan nasional, perlu dikemukakan dahulu apa sebenarnya makna pendidikan itu.

### 1. Pandangan Para Ahli tentang Pendidikan

Berikut ini, pandangan dari para ahli mengenai pendidikan.

- Ki Hadjar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran, dan tumbuh anak. Definisi lain tentang pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
- Nursid Sumatmadja, mengemukakan bahwa secara gamblang pendidikan sebagai proses pengubah perilaku individu ke arah kedewasaan dan kematangan.
- M.J. Langeveld, mengemukakan pendidikan ialah pemberi bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukan.
- Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1); pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

- e. Paulina Pannen, mengemukakan bahwa pengertian pendidikan sebagai sistem, yaitu sebagai satu keseluruhan karya insani yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam usaha mencapai tujuan akhir.

## 2. Batasan Pendidikan Berdasarkan Fungsinya

Dilihat dari segi fungsinya, pendidikan dapat dibedakan sebagai berikut.

### a. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya

Pendidikan yang diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain merupakan proses transformasi budaya. Dalam proses ini terdapat tiga bentuk transformasi, yaitu:

- 1) nilai-nilai yang masih cocok diteruskan seperti nilai rasa tanggung jawab;
- 2) nilai-nilai yang kurang cocok diperbaiki, seperti nilai dalam adat istiadat;
- 3) nilai-nilai yang tidak cocok untuk diganti, seperti nilai yang dahulu ditabukan, diganti dengan transparansi contohnya masalah pendidikan seks.

### b. Pendidikan sebagai Pembentukan Pribadi

Dalam kaitannya dengan proses pembentukan pribadi, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik. Untuk itu, ada dua sasaran dalam proses pembentukan pribadi:

- 1) Pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang telah dewasa.
- 2) Pembentukan pribadi bagi mereka yang telah dewasa atas usaha mereka sendiri.

### c. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warga Negara yang Meng-Indonesia

Pendidikan bermakna sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah penafsiran suatu bangsa berdasarkan falsafah hidup bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia,

warga negara yang baik itu, antara lain dapat diartikan sebagai pribadi yang tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

### d. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja dapat diberi makna sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga peserta didik memiliki bekal dasar untuk bekerja.

Perlunya hak atas pekerjaan telah ditegaskan pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupannya yang layak bagi kemanusiaan.

## 3. Konsep Pendidikan Seumur Hidup

Berikut ini adalah penjelasan mengenai konsep pendidikan seumur hidup.

### a. Hakikat Pendidikan Seumur Hidup

A.J. Cropley menekankan bahwa pertumbuhan kejiwaan, perkembangan kepribadian, pertumbuhan sosial ekonomi serta kebudayaan, seluruhnya berlangsung terus-menerus seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematis, setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif dinamis, kreatif, dan inovatif terhadap diri dan perubahan zaman merupakan suatu tuntutan.

### b. Definisi Pendidikan Seumur Hidup

Pendidikan seumur hidup bukan suatu pendidikan yang terstruktur, melainkan suatu prinsip yang menjadi dasar dan menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, pendidikan menembus batas-batas kelembagaan, pengelolaan, program yang telah mendeskakan diri pada sistem pendidikan.

Pendidikan seumur hidup dapat diartikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup untuk memperoleh suatu tujuan atau ide formal dalam pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan.

### c. Rasional Pendidikan Seumur Hidup

A.J. Cropley mengemukakan beberapa alasan mengapa pendidikan seumur hidup itu diperlukan. Berikut ini alasannya:

#### 1) Keadilan

Tertaksananya pendidikan seumur hidup secara meluas di kalangan masyarakat dapat menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan terwujudnya keadilan sosial.

#### 2) Ekonomi

Pada negara-negara yang sedang berkembang, biaya untuk pembangunan khususnya biaya untuk pendidikan sangat terbatas. Selain itu, terdapat masalah dalam pendidikan seumur hidup yang mendasarkan diri pada konsep dalam pemrosesan pendidikan yang mempunyai implikasi terhadap pembiayaan pendidikan yang lebih longgar dan lebih luas.

#### 3) Faktor sosial dengan perubahan peran berbagai lembaga dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)

Iptek dengan perkembangannya yang dahsyat yang melanda baik negara maju maupun negara sedang berkembang telah mengakibatkan telah terjadinya perubahan ekonomi-sosial dan nilai budaya. Selain itu, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi-fungsi lain seharusnya diperankan oleh lembaga keluarga telah lebih banyak diambil alih oleh lembaga-lembaga lain di luar lembaga keluarga, khususnya oleh sekolah.

#### 4) Perkembangan iptek

Pengaruh perkembangan iptek telah melanda sektor pembangunan dalam segala segi. Di lain pihak timbul pendekatan baru dan perubahan orientasi dalam proses belajar mengajar, perubahan peran guru dan siswa, semakin bervariasi penggunaan sumber belajar.

#### d. *Pertanya Pendidikan Seumur Hidup*

Pendidikan seumur hidup sangat diperlukan karena pendidikan seumur hidup memiliki ciri khas berikut.

- 1) Pendidikan seumur hidup menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah.
- 2) Pendidikan seumur hidup merupakan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup yang berkesinambungan.
- 3) Pendidikan seumur hidup lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan.

- 4) Pendidikan seumur hidup menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama di dalam proses pendidikan.

### F. FAKTOR-FAKTOR PENDIDIKAN

Berikut ini akan dijelaskan faktor-faktor pendidikan.

#### 1. Faktor Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana peserta didik itu akan dibawa. Tujuan pendidikan itu bukan statis, melainkan dinamis. Berikut ini pandangan para ahli tentang tujuan pendidikan.

- a. Socrates. Menurut Socrates tujuan pendidikan adalah membina manusia agar mampu menemukan dirinya sendiri.
- b. Plato. Menurut konsep Plato adalah bahwa pendidikan dan politik tidak dapat dipisahkan dengan tercapainya masyarakat yang adil dan bahagianya.
- c. Ph. Kohnstamm. Menurut Ph. Kohnstamm bahwa tujuan pendidikan adalah menolong manusia yang sedang bertumbuh supaya ia dapat menikmati kedamaian batin dan tanpa gangguan atau membebani orang lain.
- d. Ft. Vebriarto. Menurut Ft. Vebriarto tujuan pendidikan, yaitu mempribadikan manusia agar manusia: (1) mampu melindungi dirinya berdasarkan nilai yang baik keadilan, kebenaran, kesucilaan, dan keindahan Sikap yang kritis, kreatif, tekun, hemat, cermat dan tepat menghadap lingkungan; (2) mampu mengadakan sarana dan upaya dengan mengembangkan; pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan; (3) mampu hidup dengan manusia dalam usaha membentuk keluarga dan hidup bermasyarakat; (4) bertanggung jawab atas keselamatan ekologisnya.
- e. M.J. Langeveld. Menurut M.J. Langeveld tujuan pendidikan dibedakan atas enam, yakni (1) tujuan umum/tujuan akhir; (2) tujuan khusus; (3) tujuan insidental; (4) tujuan sementara; (5) tujuan intermedier; (6) tujuan sebahagian.
- f. Ki Hadjar Dewantara. Beliau mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah agar anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

#### a. Hierarki Tujuan Pendidikan

Menurut Soemritro, hierarki tujuan pendidikan:

- 1) Tujuan umum/tujuan akhir pendidikan disebut juga tujuan yang disempurnakan baik jasmani maupun rohani.
- 2) Pengkhususan tujuan umum, yaitu tujuan setiap lembaga pendidikan, seperti tujuan pendidikan di TK, SD, SLTP, SMU dan seterusnya.

Bagi kita bangsa Indonesia terdapat empat macam tujuan pendidikan yang berbeda hierarki dan luasnya.

- 1) Tujuan pendidikan nasional merupakan seluruh proses pendidikan. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia berlandaskan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Untuk itu, terdapat enam aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu beriman, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab.
- 2) Tujuan institusional merupakan rumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan.
- 3) Tujuan kurikulum, yang bertalian dengan bidang studi yang ada pada setiap institusi pendidikan.
- 4) Tujuan instruksional merupakan rumusan secara rinci apa yang harus dikuasai peserta didik setelah ia mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan tertentu.

Dalam konteks pendidikan sekarang yang mensyaratkan pendidikan yang mengembangkan potensi anak bangsa, yang dikembangkan melalui kurikulum yang disebut *kurikulum berbasis kompetensi*. Uraian lengkap tentang hal ini diringkaskan sebagai berikut.

Kompetensi berasal dari kata *kompeten* yang diartikan sebagai keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Kompeten dalam pemakaiannya istilah diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang setelah belajar, sedangkan kompetensi upaya membangun potensi yang dimiliki si belajar. Misalnya, upaya awal untuk menentukan kualitas dari manajer yang efektif didasarkan pada sejumlah sifat-sifat kepribadian dan keterampilan manajer yang ideal. Ini adalah suatu pendekatan model *input*, yang fokus pada keterampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

Keterampilan-keterampilan ini adalah kompetensi dan mencerminkan kemampuan potensial untuk melakukan sesuatu. Dengan munculnya manajemen ilmiah, perhatian orang-orang berbalik lebih pada perilaku para manajer efektif dan pada hasil manajemen yang sukses. Pendekatan ini adalah suatu model *output*, dengan mana efektivitas manajer ditentukan, yang menunjukkan bahwa seseorang telah mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan baik.

Sementara itu, terdapat perbedaan konsep tentang kompetensi menurut konsep Inggris dan konsep Amerika Serikat. Menurut konsep Inggris kompetensi dipakai di tempat kerja dalam berbagai cara. Pelatihan sering berbasiskan kompetensi. Sistem National for Council Vocational Qualification (NCVQ) didasarkan pada standar kompetensi. Kompetensi juga digunakan dalam manajemen imbalan, dalam pembayaran berdasarkan kompetensi. Penilaian kompetensi adalah suatu proses yang perlu untuk menyokong inisiatif-inisiatif ini dengan menentukan kompetensi apa yang karyawan harus perlihatkan.

Pendapat yang hampir sama dengan konsep Inggris dikemukakan oleh Kravetz (2004). Kompetensi mencakup melakukan sesuatu, tidak hanya pengetahuan yang pasif. Seorang karyawan mungkin pandai, tetapi apabila mereka tidak menerjemahkan kepedalaiannya ke dalam perilaku di tempat kerja yang efektif, kepedaiaan tersebut tidak berguna. Jadi, kompetensi tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan.

Kebingungan yang banyak terjadi dengan kompetensi adalah pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap (*attitudes*), dan sifat-sifat pribadi lain (KSAs). Apakah KSAs sama dengan kompetensi kerja? Kravetz menyatakan tidak sama, walaupun terdapat hubungan antara KSAs dan kompetensi, ada perbedaan tertentu antara mereka. Suatu kompetensi adalah apa yang seorang karyawan mampu kerjakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari satu pekerjaan. Kinerja atau hasil yang diinginkan dicapai dengan perilaku ditempat kerja yang didasarkan pada KSAs yang ditunjukkan dengan kerangka berikut:

KSAs → Behavior → Performance

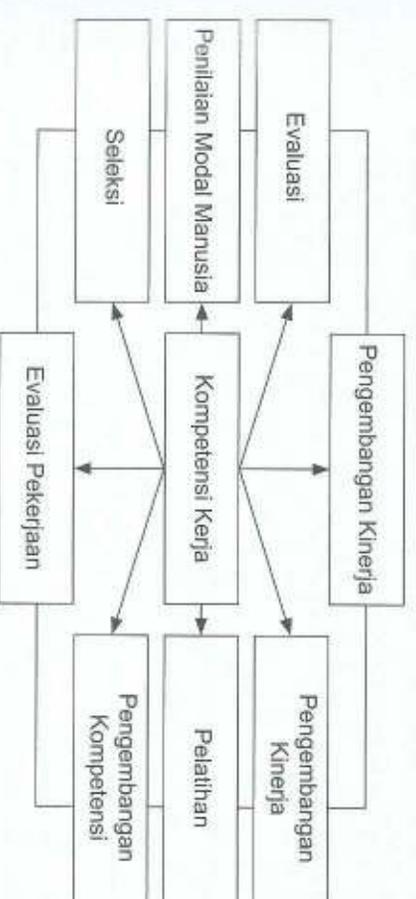
Dari kerangka di atas dapat diketahui bahwa secara teoretis KSAs sebagai dasar perilaku di tempat kerja, sedangkan perilaku di tempat kerja yang mengandung unsur-unsur KSAs menghasilkan kinerja. Untuk praktik,

suatu pekerjaan spesifik harus diidentifikasi kriteria-kriteria utamanya yang kemudian dijabarkan ke dalam dimensi dan indikator kinerja kunci yang harus dicapai berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan. KSAs di sini merupakan dasar kompetensi kerja yang merupakan kemampuan, kemauan, dan sikap untuk mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan dalam setiap pekerjaan spesifik. Kemampuan, kemauan, dan sikap ini dapat diamati dalam perilaku di tempat kerja dalam seseorang melaksanakan pekerjaannya.

Misalnya, motivasi sesungguhnya tidak lain adalah sikap seseorang dalam bekerja di tempat kerja, seperti bersemangat, tekun, ulet, yang tidak dapat diamati di luar tempat kerja. Dasar motivasi adalah kebutuhan manusia, yang menimbulkan dorongan atau tidak untuk berperilaku tertentu. Kepemimpinan tidak lain adalah KSAs, artinya mengandung unsur-unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses memengaruhi orang lain. Komunikasi sebagai bidang ilmu pemahaman juga mengandung KSAs, artinya untuk berkomunikasi yang efektif harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang etis. Jadi, tidak ada pekerjaan apa pun yang tidak mengandung KSAs, hanya berbeda dalam proporsinya saja.

Dalam bidang pendidikan dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi memerlukan adanya keterkaitan dan kesesuaian antara lembaga pendidikan dan dunia kerja (*link* antara Universitas & Industri). Sebagai konsekuensinya, kurikulum berbasis kompetensi harus dirancang berdasarkan pada praktik-praktik dalam industri, sebaliknya praktik dalam industri seharusnya didasarkan pada KSAs yang telah diperoleh dari lembaga pendidikan. Di Indonesia, berarti perlu adanya kerja sama antara badan yang mempunyai otoritas dalam penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dengan badan yang mempunyai otoritas menentukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang berwewenang memberikan sertifikasi profesi. Apabila tidak maka kurikulum berbasis kompetensi kemungkinan besar tidak akan sesuai dengan standar kompetensi kerja dalam industri. Berarti kurikulum berbasis kompetensi tidak mampu menyediakan SDM yang "siap pakai".

Kompetensi kerja secara teoretis dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti pelatihan, pengembangan karier, imbalan berdasarkan kompetensi, seleksi, petunjuk stratejik, yang dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Bagan Model Kompetensi dalam Pekerjaan

#### b. Sistem Kompetensi di Inggris

Menurut Shirley Fletcher (2005) pada awal tahun 1970-an, program *New Training Initiative* (MSC, 1981) untuk pertama kali diluncurkan sebagai landasan standar baru (*standards of new kinds*). Pada tahun 1986, *White Paper* dan peninjauan kembali kualifikasi keterampilan kejuruan (*vocation qualifications*) mengarahkan lahirnya Program Pengembangan Standar (*Standards Development Programme*). Kemudian, *Manpower Service Commission* diberi tanggung jawab untuk mengembangkan standar kinerja pekerjaan untuk semua sektor industri.

Tinjauan terhadap kualifikasi keterampilan kejuruan juga mengarah pada pembentukan NCVQ, dan sekarang menjadi *Qualification and Curriculum Authority* (QCA), yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kriteria kerangka kualifikasi baru berdasarkan standar kompetensi baru.

Masing-masing industri diminta mengembangkan standar untuk sektornya sendiri. Badan asosiasi masing-masing industri diberi tanggung jawab mengelola proyek pengembangan standar kompetensi untuk sektornya sendiri. Mereka juga mengembangkan standar yang berlaku untuk semua peran pekerjaan pada semua sektor industri dan perdagangan. Di Inggris standar berbasis kompetensi mencerminkan harapan kinerja di tempat kerja. Pengembangan standar kompetensi pribadi yang melengkapi standar kompetensi kerja juga terus dilanjutkan.

### c. *Amerika Serikat-Model Awal dalam Pendidikan*

Umumnya, orang sepakat bahwa pendidikan berbasis kompetensi berakar dari pendidikan guru, yang biasanya disebut sebagai *competency-based education and training* (CEBT). Pengembangan dipercepat oleh pendanaan dari US Office of Education untuk mengembangkan model program pelatihan bagi guru-guru sekolah dasar.

Model ini mencakup spesifikasi tepat mengenai kompetensi atau perilaku yang harus dipelajari, instruksi yang berdasarkan modul, pengalaman pribadi dan di lapangan. Model ini dikenal sebagai pendidikan guru berbasis kompetensi atau *Performance Based Teacher Education* (PBTE). Akan tetapi, model ini mendapat reaksi dari lembaga pendidikan tinggi yang memandang ten baru tersebut sebagai ancaman otonomi dan status akademis. Sistem berbasis model ini juga menuntut reorganisasi sumber daya yang besar—isu yang berdampak pada bidang pendidikan dan pelatihan pada semua level (Shirley Fletcher, 2005).

## 2. **Faktor Pendidik**

Pengertian pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan untuk memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, dan makhluk sosial.

Dalam garis besarnya, pendidik dapat dikategorikan sebagai pendidik kodrati dan pendidik karena jabatan.

Hakikat pendidikan menurut T. Raka Joni:

- pendidik sebagai agen pembaruan;
  - pendidik adalah pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat;
  - pendidik sebagai fasilitator;
  - pendidik bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar peserta didik.
- Peranan pendidik, yang berarti setiap pendidik mempunyai peranan:
- sebagai komunikator, yang berfungsi mengajarkan ilmu dan keterampilan kepada peserta didik;
  - sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai pelancar proses belajar;
  - sebagai motivator berfungsi melaksanakan minat dan semangat belajar peserta didik yang terus-menerus.

## 3. **Faktor Peserta Didik**

Faktor peserta didik adalah mereka yang berstatus sebagai subjek didik. Pendidik perlu memahami peserta didik pada ciri khasnya, yaitu individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang un dan individu yang sedang berkembang.

Peserta didik, dalam hal ini telah digunakan dalam undang-undang pendidikan kita yang mengarah pada si belajar. Meskipun demikian, agar lebih jelas siapa sebenarnya peserta didik itu, sedikit diberikan contoh berdasarkan kata-kata jenis dan tingkat pendidikan.

- Peserta didik di Taman Kanak-Kanak disebut dengan anak.
- Peserta didik di Sekolah Dasar disebut murid.
- Peserta didik di Sekolah Menengah disebut siswa.
- Peserta didik di Perguruan Tinggi disebut mahasiswa.
- Peserta didik di Pesantren disebut santri.
- Peserta didik di Pendidikan Luar Sekolah disebut warga belajar.
- Peserta didik di Pelatihan disebut peserta belajar.

## 4. **Faktor Alat Pendidikan**

Faktor alat pendidikan menyatakan bahwa alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat pendidikan merupakan fasilitas yang digunakan agar berlangsungnya pembelajaran. Alat-alat ini misalnya ketika seorang guru menuliskan materi pelajaran di papan tulis maka yang menjadi alat di sini adalah papan tulisnya. Demikian pula ketika guru menayangkan materi pembelajarannya melalui kertas transparansi maka yang menjadi alat adalah OHP. Sementara metode pembelajarannya adalah cara yang dilakukan untuk memudahkan proses pembelajaran agar materi pembelajaran dapat dengan mudah diterima peserta didik. Uraian lebih detail tentang alat pendidikan dapat dibaca pada buku *Perencanaan Pembelajaran* karya penul yang sama yang diterbitkan Bumi Aksara.

## 5. **Faktor Lingkungan Pendidikan**

Secara umum, lingkungan dikenal sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar. Menurut Miarso, lingkungan belajar adalah situasi sekitar di mana pesa

diterima, yang berbentuk dari lingkungan fisik dan nonfisik.<sup>1</sup> Dicontohkan bahwa lingkungan fisik, antara lain berupa gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar, studio, auditorium, museum, dan taman. Sedangkan lingkungan nonfisik, berupa penerangan, sirkulasi udara, dan lain-lain.

Di sekolah, tiap siswa berada dalam lingkungan sosial sekolah. Siswa memiliki kedudukan dan peranan yang diakui oleh sesama. Apabila seseorang siswa diterima maka ia dengan mudah menyesuaikan diri dan segera dapat belajar. Sebaliknya, jika ia tertolak maka ia akan merasa tertekan. Lingkungan sosial sekolah dapat memberikan pengaruh pada siswanya. Pengaruh tersebut berupa hal-hal berikut: (a) pengaruh kejiwaan yang bersifat menerima atau menolak siswa, yang akan berakibat memperkuat dan memperlemah konsentrasi belajar; (b) lingkungan sosial mewujudkan dalam suasana akrab, gembira, rukun dan damai; sebaliknya, lingkungan sosial mewujudkan dalam suasana perselisihan, bersaing, salah menyalahkan, dan cerai-berai. Suasana kejiwaan dalam lingkungan sosial siswa dapat menghambat proses belajar, dan (c) lingkungan sosial siswa di sekolah atau juga di kelas dapat berpengaruh pada semangat belajar kelas, dan setiap guru akan disikapi secara tertentu oleh lingkungan sosial siswa. Sikap positif atau negatif terhadap guru akan berpengaruh pada kewibawaan guru. Akibatnya, bila guru menegakkan kewibawaan maka ia akan dapat melola proses belajar dengan baik. Sebaliknya, bila guru tidak berwibawa, maka ia akan mengalami kesulitan dalam mengelola proses belajar.<sup>2</sup> Lingkungan sosial merupakan salah satu dari lingkungan nonfisik.

Masalah bagaimana membuat lingkungan ini menjadi sumber belajar bagi peserta didik? Bagaimana menjadikan kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa? Untuk membuat modifikasi dari lingkungan kelas tradisional yang berpusat pada guru ke lingkungan yang berpusat pada siswa, diperlukan modifikasi dari prosedur belajar dan pembelajaran. Menurut Parke dalam Munandar, lingkungan yang berpusat pada siswa menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

<sup>1</sup> Prof. Dr. Yusufnadi Miarso, dkk., *Teknologi Komunikasi Pendidikan, Pengertian dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 7.

<sup>2</sup> Dr. Dinyati dan Drs. Mujiiono, *Belajar dari Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 252-253.

a. Siswa menjadi mitra dalam membuat keputusan tentang kurikulum. Bagi siswa tersedia pilihan untuk mengembangkan keterampilan dan menentukan bagaimana sebagian atau seluruh waktu mereka gunakan.

b. Pola duduk yang memudahkan belajar. Dalam lingkungan kelas yang berpusat pada siswa, kursi-kursi disusun sehingga belajar berlangsung dengan mudah dan nyaman, misalnya dengan menyusun pengelompokan kegiatan kelompok besar dan kelompok kecil. Di samping itu, disediakan tempat untuk belajar mandiri dan pusat belajar.

c. Kegiatan dan kesibukan di dalam kelas. Dalam kelas yang berpusat pada siswa, dengan berbagai macam kegiatan dan kesibukan, tertentu ada suara-suara yang dapat mengesankan keberisikan, tetapi yang sebetulnya mencerminkan pelibatan siswa secara aktif dan kreatif. Siswa tidak semunya melakukan hal yang sama pada saat yang sama; mereka perlu bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Hal yang penting adalah siswa belajar bagaimana berpindah-pindah tempat dan bagaimana berbicara dan berdiskusi tanpa mengganggu siswa lainnya.

d. Rencana belajar yang diindividualkan. Lingkungan belajar yang berpusat pada siswa memperhatikan kebutuhan belajar perorangan dari siswa. Untuk itu, dikembangkan rencana belajar yang individualkan (*individualized learning plans*), atau kontrak belajar untuk siswa. Rencana ini didasarkan atas kemampuan, tingkat prestasi, dan minat siswa.

e. Keputusan dibuat bersama oleh guru dan siswa jika mungkin. Untuk siswa menjadi pelajar mandiri, mereka perlu diberikan kesempatan membuat keputusan dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Untuk itu, guru dapat melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan sebagian. Misalnya, dengan bersama-sama menyetujui aturan-aturan kelas sampai dengan pelibatan siswa dalam penentuan kegiatan belajar, waktu dan kecepatan belajar, serta evaluasi.

Dengan memodifikasi lingkungan belajar tradisional yang berpusat kepada guru ke lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, siswa menjadi pelajar aktif, mandiri, dan bertanggung jawab, dan semua siswa, dimungkinkan untuk memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan minat dan tingkat kemampuannya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> S.C. Utami Munandar, *Kualitas dan Keberhasilan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 216-217.

Kondisi gedung sekolah, tata ruang kelas, alat-alat belajar mempunyai pengaruh pada kegiatan belajar. Di samping kondisi fisik tersebut suasana pergaulan di sekolah juga berpengaruh pada kegiatan belajar. Guru memiliki peranan penting

Lingkungan belajar ini juga dapat berupa hal-hal yang nyata dan dapat diamati, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Akan tetapi, lingkungan dapat merupakan suatu hal di luar anak yang tidak ditangkap oleh indranya karena sifatnya abstrak, seperti situasi politik, adat istiadat, dan agama.

## G. PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM

Berikut ini penjelasan mengenai pendidikan sebagai sistem.

### 1. Pengertian Sistem

Sistem dapat diartikan sebagai seperangkat komponen atau unsur yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan. Tarang M. Amirin memberikan pengertian sistem sebagai berikut.

- a. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal yang membentuk suatu kebulatan.
- b. Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan bersama-sama yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Sistem merupakan kehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### 2. Pendidikan sebagai Suatu Sistem

Sebagai suatu sistem, pendidikan adalah suatu keseluruhan karya insani yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga mencapai kualitas hidup yang diharapkan. Pendidikan sebagai suatu sistem sosial, merupakan sistem terbuka yang dibataskan sebagai sistem yang memperoleh masukan dari lingkungan dan memberikan hasil transformasinya pada lingkungan.

Komponen-komponen sistem pendidikan meliputi berikut ini.

- a. Tujuan dan prioritas, yang berfungsi memandu kegiatan-kegiatan sistem pendidikan.
- b. Pelajar atau peserta, berfungsi dalam proses perubahan kualitas tingkah laku seperti yang diharapkan oleh sistem pendidikan.
- c. Manajemen, yang berfungsi untuk merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan.

Proses pendidikan adalah proses transformasi atau perubahan kemampuan potensial individu peserta didik menjadi kemampuan nyata untuk meningkatkan taraf hidupnya lahir dan batin. Terdapat dua arah dari upaya proses pendidikan, yaitu menjaga kelangsungan hidupnya dan menghasilkan sesuatu. Aspek yang lain dari sistem pendidikan adalah keluaran yang disebut hasil pendidikan. Hasil pendidikan adalah lulusan yang sudah terdidik berdasarkan atau mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Hasil pendidikan merupakan hasil indikator efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dalam sistem pendidikan.

## H. PENDIDIKAN FORMAL, NONFORMAL, DAN INFORMAL SEBAGAI SEBUAH SISTEM

Pendidikan persekolahan yang kita kenal dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal sebagai mitra pendidikan merupakan sebuah sistem. Pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang telah baku. Selanjutnya, pendidikan nonformal menampung dan melayani warga negara yang tidak sempat ikut atau menyelesaikan pendidikan. Pendidikan informal merupakan suatu aset pendidikan yang berada di samping dan di dalam pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal, nonformal, dan informal memang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Karena keberhasilan pendidikan dalam pengertian *output* pendidikan yang berupa sumber daya manusia mutunya tidak dapat dilepaskan dari peran subsistem pendidikan.



melekat pada kehidupan manusia itu sendiri, pendidikan dapat dikatakan hidup manusia itu sendiri. Selama manusia itu hidup bersama terjadi proses pendidikan. Sebab pendidikan, pada hakikatnya adalah usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.

Dalam praktik pendidikan masyarakat itu selalu berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan filsafat yang dianutnya bahkan masing-masing individu berbeda dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pandangan hidup. Misalnya, pendidikan yang dilaksanakan pada zaman Majapahit berbeda dengan pendidikan pada zaman Mataram. Pendidikan Majapahit diorientasikan dan dipengaruhi oleh pandangan hidup agama Hindu-Buddha, sedangkan pendidikan Mataram dipengaruhi oleh pandangan hidup agama Islam. Datangnya bangsa penjajah di Indonesia membawa perubahan pada orientasi kegiatan pendidikan di Indonesia. Sebab pendidikan dipengaruhi oleh pandangan hidup bangsa penjajah tersebut.

Selain itu, pendidikan taman siswa dari Ki Hadjar Dewantara berbeda dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda. Sebab pendidikan yang dilaksanakan oleh Ki Hadjar Dewantara dipengaruhi oleh pandangan hidupnya, sedangkan pendidikan Belanda dipengaruhi oleh pandangan hidup bangsa Belanda sebagai bangsa penjajah. Sementara itu, pada zaman Indonesia merdeka orientasi pendidikan berbeda dengan orientasi pendidikan zaman sebelumnya, pendidikan zaman kemerdekaan itu berorientasi pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu falsafah Pancasila.

Sebagai anggota masyarakat dan warga negara Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila maka setiap pendidik harus mengutamakan penghayatan dan pengalaman Pancasila dalam melaksanakan praktik pendidikan. Pengalaman dan penghayatan Pancasila ini sebagai seorang pendidik mempunyai kewajiban ganda, yaitu menghayati dan mengamalkan Pancasila bagi dirinya sendiri dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada siswa-siswanya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 2 dan 3 merumuskan dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional sebagai berikut.

- a. Pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## 2. Pengertian Kebudayaan

Telah diketahui bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk budaya yang harus membudayakan dirinya. Manusia sebagai makhluk budaya mampu melepaskan dirinya dari ikatan dorongan nalurinya, serta mampu menguasai alam sekitarnya dengan alat pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini berbeda dengan binatang sebagai makhluk hidup yang sama-sama makhluk alamiah dengan manusia. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari ikatan dorongan nalurinya dan terikat erat oleh alam sekitarnya.

Kemampuan manusia tidak terbatas pada kemampuan untuk menciptakan tempat tinggal saja, tetapi juga menciptakan berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ini semua berkat manusia sebagai makhluk budaya yang mampu menciptakan kebudayaan.

Istilah kebudayaan berasal dari kata "budhi" bahasa Sanskerta. Dari kata budhi ini kemudian dibentuk kata "budhaya" yang artinya bangun atau sadar. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *culture*, dalam bahasa Belanda dikenal *cultuur*, dalam bahasa Jerman kultur sama dengan dalam bahasa Indonesia (JWM Bakker SY, 1984:29).

Havighust dan Neugarten menyatakan bahwa kebudayaan dapat didefinisikan sebagai cara bertingkah laku, etiket, bahasa, kebiasaan makan, kepercayaan agama dan moral, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang merupakan hasil karya manusia seperti halnya bermacam-macam benda termasuk di dalamnya alat-alat teknologi. Dari pendapat ini, dapat kita ketahui

bahwa kebudayaan dapat berwujud tingkah laku, dan hal-hal yang berupa rohaniah dapat pula berupa barang-barang material.

Diyarkara SJ menjelaskan bahwa kebudayaan dalam arti yang luas mempunyai empat segi atau empat aspek (pengasuh Majalah Basis, 1980:83-84). Empat aspek itu adalah *pertama* aspek ekonomi. Dalam aspek ini, manusia dengan tangannya mengubah barang-barang tertentu menjadi suatu barang yang berguna bagi manusia. Misalnya, kaum ibu di pedesaan mengubah ketela pohon menjadi beraneka ragam makanan. Aspek yang *kedua* adalah aspek teknik. Dalam aspek ini manusia dengan menggunakan tangannya dan kemungkinannya-kemungkinannya, serta sifat-sifat yang ada pada barang tertentu, hukum-hukum yang ada dalam barang-barang tertentu dari benda-benda alam disusun menjadi sesuatu hal yang baru. Misalnya, tukang batu menyusun batu, pasir, batu kapur, semen, dan air menjadi bangunan rumah.

Aspek yang *ketiga* adalah kebudayaan dalam arti khas dan sempit. Dalam mengubah barang-barang itu, manusia mengekspresikan dirinya. Dalam membuat saluran air dan mengolah ladang, manusia telah mengekspresikan dirinya, tetapi belum mengungkapkan perasaan, cita-cita, dan jiwanya yang terdalam. Manusia mencangkul untuk mengolah tanah memang telah mengekspresikan jiwanya, tetapi dalam mengolah tanah itu tidak menimbulkan rasa haru pada manusia. Lain halnya dengan lukisan, syair, pantun, dan sebagainya, merupakan ekspresi jiwa yang dapat menggetarkan jiwa manusia. Dalam sastra, seperti bidang kesenian, pembangunan gedung untuk monumen, dalam hasil-hasil ilmiah dan bangunan-bangunan keagamaan, serta sistem kemasyarakatan dan sebagainya itu, manusia lebih mengekspresikan diri dan budinya. Aspek *keempat* disebut aspek penghalusan atau *sivilisasi*. Aspek ini merupakan kelanjutan dari aspek ketiga. Dalam aspek ini, manusia dengan mengekspresikan dirinya, berusaha untuk mencari hal-hal yang lebih halus, lincah sehingga hidupnya dapat meluncur dengan mudah. Misalnya, makanan dibuat seandainya, pakaian dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi semakin nyaman dan menarik jika dipakai. Kehalusan bahasa, gerak-gerik yang indah dan macam-macam cara bergaul termasuk kategori ini.

Daed Jusuf (1982) menyatakan bahwa kebudayaan itu merupakan sistem nilai dan gagasan vital. Nilai berkaitan dengan dua hal: *pertama* berkaitan dengan standar, dasar, asas penilaian yang kita pakai di dalam kehidupan

untuk menilai segala sesuatu yang dihadapkan kepada kita untuk diputuskan, dan yang *kedua* nilai berkaitan dengan benda-benda yang bernilai itu sendiri. Harijati Soebadio (1985) menjelaskan bahwa definisi ketiga yang lebih singkat dan lebih praktis, kebudayaan adalah sistem nilai dan gagasan utamanya yang terdiri atas sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi meliputi etika, norma, adat-istiadat, peraturan-peraturan dan hukum yang berfungsi sebagai pengaruh untuk sistem sosial. Sistem sosial meliputi hubungan dan kegiatan sosial di dalam masyarakat baik yang terjadi dalam lingkungan kerabat, maupun yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Sistem teknologi meliputi segala peralatan, serta cara penggunaannya sesuai dengan nilai budaya yang berlaku.

Kuntjaraningrat (1989) menjelaskan dalam kebudayaan setidaknya-tidaknya mempunyai tiga wujud, yaitu (1) wujud sebagai suatu sistem gagasan; (2) wujud sebagai sistem perilaku; (3) wujud sebagai benda konkret.

Dalam wujudnya yang pertama kebudayaan sebagai sistem gagasan merupakan wujud kebudayaan yang abstrak. Sebagai wujud yang abstrak maka kebudayaan itu tidak dapat dilihat atau diamati. Lokasinya terletak pada kepala dan pikiran dari pemangku kebudayaan yang bersangkutan. Kebudayaan dalam wujud himpunan gagasan ini disebut sistem budaya (*culture system*). Disebut sistem budaya sebab himpunan gagasan ini tidak berdiri sendiri sebagai satuan-satuan yang terpisah melainkan tersusun dalam satu kesatuan yang saling berkaitan erat antara gagasan yang satu dengan gagasan yang lain.

Wujud yang kedua kebudayaan adalah wujud yang lebih konkret. Kebudayaan adalah perilaku yang berpola dari manusia yang saling berinteraksi dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dalam wujud ini dapat diamati, difoto bahkan difilmkan. Kebudayaan dalam wujud ini tidak hanya berupa upacara-upacara ritual saja, tetapi juga perilaku manusia dan kebiasaan hidup sehari-hari seperti makan, pergi bekerja, beristirahat, berekreasi. Selain itu, perilaku dalam bertengkar, berkelahi atau berperang. Kebudayaan dalam wujud perilaku ini disebut sistem sosial (*social system*).

Kebudayaan dalam wujud ketiga adalah wujud yang paling konkret dan nyata. Secara teknis kebudayaan ini merupakan kumpulan benda-benda artefak merupakan kebudayaan fisik.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan itu merupakan ekspresi diri manusia yang dapat berupa sistem gagasan, sistem nilai, sistem perilaku atau sistem sosial, tetapi dapat pula berupa barang yang bernilai.

### C. JENIS-JENIS KEBUDAYAAN DI INDONESIA

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kebudayaan itu bermacam-macam. Kebudayaan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu kelompok sistem gagasan atau sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi atau benda-benda konkret. Jenis-jenis kebudayaan ini bersifat umum, artinya bahwa kebudayaan di mana pun dapat dibedakan menjadi tiga jenis tersebut. Oleh karena itu, perlu dicari pembedaan jenis kebudayaan yang khusus di Indonesia.

Harsya W. Bachtiar (1985) menjelaskan bahwa jenis-jenis kebudayaan itu dapat dijelaskan dengan pendekatan fenomena budaya yang ada di Indonesia. Apabila fenomena budaya itu dipahami sebagai sistem-sistem budaya yang ada, yakni fenomena budaya yang saling berkaitan itu dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar di kepulauan Indonesia yang berpenduduk lebih dari 255 juta jiwa ini, setidak-tidaknya ada empat macam sistem budaya yang berbeda satu sama lain. Empat sistem budaya ini mengatur seluruh aspek kehidupan orang yang dianggap atau yang lebih penting lagi menganggap dirinya sendiri sebagai pemilik sistem budaya itu.

*Pertama* sistem budaya etnik. Sistem budaya etnik ini disebut juga sistem budaya adat. Di kepulauan Indonesia terdapat bermacam-macam sistem budaya etnik. Masing-masing sistem budaya etnik mempunyai wilayah budaya. Sebagian besar warga sistem budaya etnik tertentu tinggal di suatu daerah tertentu dengan anggapan bahwa seluruh wilayah budaya itu mempunyai batas-batas yang jelas, meskipun ada kemungkinan adanya pergeseran sebagai tanah leluhur mereka.

Luas tanah leluhur ini berbeda-beda dari yang paling sempit sampai yang paling luas. Kondisi geografis dari masing-masing, etnis berbeda-beda seperti hutan, gunung, sungai, lembah, flora dan fauna, kota dan desa yang kesemuanya ini ikut serta membentuk budaya etnis ini.

Jumlah warga masing-masing sistem budaya etnik ini tidak sama, ada yang besar jumlahnya, dan ada pula yang kecil jumlahnya. Sistem budaya etnik

yang kecil jumlah warganya terdapat di Papua dan di pulau terpencil. Sementara itu, sistem budaya yang besar warganya terdapat di pulau Jawa, yaitu sistem budaya etnik Jawa yang terdiri atas penduduk Jawa Tengah dan penduduk Jawa Timur. Jumlah warga sistem budaya etnik dijelaskan oleh Harsya W. Bachtiar (1985: 5) sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel Jumlah Warga Masyarakat Etnik di Indonesia

No.	Masyarakat Etnik	Tempat Tinggal	Jumlah
1.	Jawa	Jawa Tengah, Jawa Timur	54.750.710
2.	Sunda	Jawa Barat	17.232.180
3.	Madura	Madura, Jawa Timur	8.532.997
4.	Minangkabau	Sumatera Barat	3.897.130
5.	Bugis	Sulawesi Selatan	3.037.625
6.	Batak	Sumatra Utara	2.420.420
7.	Bali	Bali	2.228.789
8.	Jakarta	Jakarta	1.228.789
9.	Melayu	Sumatera Timur	1.811.526
10.	Banjar	Kalimantan Selatan	1.000.000
11.	Aceh	Sumatera Utara	1.666.750
12.	Palembang	Sumatera Selatan	1.545.647
13.	Sasak	Lombok	1.322.211
14.	Dayak	Kalimantan Tengah	1.305.992
15.	Makasar	Sulawesi Selatan	1.208.608
16.	Toraja	Sulawesi Tenggara Bagian Selatan	1.117.944
17.	Menado	Sulawesi Utara	564.587
18.	Lain-lain		10.111.960

Jumlah warga masyarakat etnik tersebut berdasarkan dugaan yang berorientasi pada semua penduduk tahun 1970. Proporsi jumlah warga budaya etnik ini pada tahun 1989 dengan perkiraan jumlah penduduk 175 juta jiwa akan lebih besar daripada jumlah warga masyarakat etnik yang tertera pada tabel di atas.

Pada awalnya inti, dari sistem budaya etnik adalah suatu sistem kepercayaan keagamaan yang meresap pada keseluruhan sistem budaya ini. Sistem kepercayaan ini adalah mitos-mitos mengenai asal usul nenek moyang dan biasanya merupakan suatu kosmologi yang rumit. Sistem kepercayaan

ini membentuk kategori-kategori suatu sistem budaya dalam mempersepsi lingkungan dan persepsi itu memengaruhi pola pemikiran dan tindakannya.

Mattulada (1985) menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap roh-roh tenaga gaib, Benda-benda keramat memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian dari sudut pandang ini ilmu yang tertinggi adalah ilmu yang bertalian dengan hal-hal yang gaib. Orang yang dipandang mulia adalah mereka yang memiliki ilmu-ilmu gaib. Pikiran dan perbuatan mereka diresapi oleh kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib sehingga mereka senantiasa berusaha untuk mendapatkan bantuan dari roh-roh atau kekuatan yang gaib dengan menggunakan berbagai upacara, jampi-jampi, serta jimat-jimat. Pengetahuan dan pandangan mereka tersimpul dalam pusaka rohani nenek moyang mereka.

Sedikit demi sedikit unsur yang bersifat duniawi terpisah dari sistem sistem kepercayaan yang bersifat religius dan hilang kaitannya secara langsung dengan hal-hal yang bersifat gaib. Perbedaan dengan unsur-unsur budaya yang lebih duniawi dari unsur yang lebih religius ini bertingkat-tingkat. Beberapa masyarakat etnik telah mencapai keadaan sistem nilai dan norma adat istiadat yang sekuler hampir terpisah sama sekali dari sistem kepercayaan yang bersifat religius, sedangkan masyarakat etnik yang lain mempunyai sistem budaya yang secara esensial tetap bersifat religius.

Sistem budaya keduniawian yang tertinggi, yang menetapkan sesuatu hal yang perlu diperhatikan oleh anggota masyarakat etnik yang baik, dinyatakan dalam bentuk seperangkat sistem-sistem normatif. Masing-masing sistem normatif itu mendeskripsikan perilaku-perilaku yang diharapkan pada orang-orang yang menjadi anggota masyarakat etnik tertentu di mana sistem normatif itu diberlakukan. Umumnya anggota masyarakat etnik Batak diharapkan bertingkah laku sebagai anggota keluarga masing-masing sesuai dengan seperangkat norma-norma tertentu yang baik yang berkenaan dengan kepercayaan, religius maupun yang bukan sesuai dengan adat istiadat mereka.

Sistem nilai ini berbeda-beda, sedangkan sistem normatif lebih berbeda beda lagi seiring dengan semakin kompleksnya pembagian kerja di dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya, sistem budaya etnik Jawa merupakan sistem budaya yang paling kompleks dan maju. Sela in itu, masyarakat pedesaan dan

perkotaan berbeda dalam kehidupan sosial sebab dikendalikan oleh sistem budaya etnik tertentu. Sistem budaya pedesaan dipengaruhi oleh budaya yang agraris dan sistem budaya perkotaan di mana sistem budaya yang beragam disebabkan oleh adanya kelompok etnik yang beragam. Sistem budaya agama-agama besar. Apabila kita perhatikan sejarah bukunya agama-agama besar yang dianut oleh bangsa Indonesia maka agama-agama besar yang datang di Indonesia tidak bersama-sama.

Agama yang masuk ke Indonesia pertama kali adalah Agama Hindu dan Buddha. Noerhadai Magetsari (1980:60) menyatakan bahwa berdasarkan pendapat Bosch (1952), Sumadio (1975), dan Syafei (1977) proses penerimaan kebudayaan India maka orang Indonesia mengolahnya dengan kebudayaan yang telah dimilikinya. Proses penerimaan kebudayaan India ini disebut *proses asimilasi* dan *integrasi*. Proses asimilasi dapat terjadi karena kebudayaan mempunyai banyak unsur yang sejenis, mempunyai ide yang sejenis, atau ide polarisasi. Misalnya, cerita Ramayana dan cerita Mahabarata yang berkembang di Indonesia berbeda dengan yang ada di India. Agama Siwa dan Agama Buddha dapat bersatu di Indonesia sebab dapat menempati kutub-kutub polarisasi sehingga terjadi sinkretisme.

Harsya W. Bachtiar (1985:7) menjelaskan bahwa beberapa abad yang lalu agama Hindu dan Buddha telah menjadi agama sebagian besar penduduk pulau Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali. Di banyak tempat di Indonesia, agama Hindu dan agama Buddha telah mengakar dalam sistem budaya penduduk pribumi. Proses perpindahan agama orang-orang yang telah menganut agama nenek moyangnya ini menyebabkan banyaknya unsur kebudayaan pribumi yang masuk ke dalam agama Hindu dan Buddha yang telah baru di Indonesia. Hal ini menyebabkan kedua agama ini agak berbeda dengan ajaran aslinya.

Masyarakat etnik itu, kecuali Bali, kemudian mengubah menjadi pelepasan agama Islam. Sekarang sebagian besar penduduk pribumi di kepulauan Indonesia memeluk agama Islam dan mengikuti sistem budaya Islam. Apabila dilihat dari jumlah pemeluknya, Indonesia dapat dikatakan negara Islam terbesar di dunia. Apa yang terlihat pada agama Hindu dan Buddha dalam kaitannya dengan bermacam-macam sistem budaya etnik, berlaku juga bagi agama Islam. Oleh karena itu, manifestasi budaya secara keseluruhan

agama ini berbeda jika agama Islam yang ada di kepulauan ini dibandingkan. Agama Islam yang ada di Jawa, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Selatan dan beberapa tempat yang lain pasti berbeda-beda. Hal ini disebabkan pemasukan unsur-unsur budaya etnik dari daerah ini memengaruhi budaya Islam. Meskipun demikian, inti budaya Islam tetap sama sebagai manifestasi ajaran agama Islam.

Masuknya bangsa-bangsa Barat ke kepulauan Indonesia membawa agama Katolik dan Kristen Protestan. Lambat laun masyarakat etnik telah berpindah memeluk agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Sejumlah masyarakat etnik di Flores dan Kalimantan, misalnya telah menganut agama Katolik. Sebagian orang Manado di Sulawesi Utara, sebagian orang Ambon di Maluku, mayoritas orang Batak di Sumatera Utara, dan beberapa daerah di Jawa menganut agama Kristen Protestan. Seperti halnya agama Islam, agama Hindu, dan agama Buddha maka unsur-unsur budaya etnik juga memengaruhi budaya Katolik dan Kristen Protestan di Indonesia.

### 1. Sistem Budaya Indonesia

Pernulaan abad ini, unsur-unsur sebuah sistem budaya baru telah muncul di kalangan penduduk pribumi. Nama Indonesia diciptakan oleh seorang antropolog Inggris pada tahun 1850. Indonesia nama untuk gugusan kepulauan yang tersebar antara Benua Asia dan Australia. Batas yang pasti pada masyarakat baru ini baru menjadi jelas pada bulan Juli 1945. Batas baru ini ditetapkan sama dengan wilayah yang dahulunya disebut Hindia Belanda. Beberapa tahun terakhir ini konsep perbatasan ini diperluas dengan masuknya Timor Timur ke dalam Indonesia.

Sistem budaya Indonesia juga mengembangkan sistem normatif dan nilai-nilai dasarnya sendiri, yang tidak berakar secara utuh pada salah satu budaya masyarakat etnik atau tradisi-tradisi keagamaan yang ada pada saat ini. Ia berakar pada semua sistem budaya yang ada. Nilai-nilai dasarnya telah dirumuskan menjadi ideologi negara, yang disebut Pancasila, sedangkan harus diingat bahwa Pancasila bukanlah merupakan semua nilai dasar sistem budaya Indonesia. Meskipun demikian, nilai-nilai lain yang dipandang sebagai nilai-nilai dasar Indonesia kedudukannya dianggap lebih rendah dibandingkan

Pancasila. Jika terjadi konflik nilai, prioritas utama diberikan pada nilai-nilai yang menjadi ideologi nasional ini.

Pancasila mengandung kepercayaan dasar yang memungkinkan berbagai agama besar terintegrasi pada tingkatan yang paling tinggi. Hal yang menonjol pada hal ini adalah sila pertama yang juga merupakan sila utama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepercayaan ini yang sekarang merupakan inti ideologi bangsa mempersatukan para penganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha sebagai satu masyarakat Moral.

Unsur pokok sistem normatif bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selain itu, unsur-unsur penting lainnya dari sistem normatif itu adalah semua norma-norma hukum resmi di mana semua anggota masyarakat diharapkan menerapkannya dalam kegiatan mereka sebagai warga negara Republik Indonesia. Norma-norma itu mengatur hak dan kewajiban semua warga negara Indonesia dan siapa saja selama mereka tinggal di wilayah negara ini.

Sebagai sistem budaya yang berlandaskan kenyataan sosial baru yang cepat sekali pertumbuhannya, sistem budaya Indonesia yang baru ini lebih banyak mengalami pemisahan (artinya muncul norma baru dari yang sebelumnya atau baru sama sekali). Dibanding dengan sistem budaya etnik yang manapun, banyak norma baru yang sengaja dibuat untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan yang cepat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan teknologi, pembangunan pendidikan dan pembangunan lainnya. Hukum-hukum baru dan norma-norma lainnya terus-menerus dibuat untuk mengatur situasi sosial baru orang-orang yang terlibat (dalam situasi baru itu) perlu jelas hak-hak dan kewajibannya.

Norma-norma itu dijabarkan dari nilai atau konsepsi yang diterima umum. Akan tetapi, karena ada kemungkinan penginterpretasian yang berbeda-beda terhadap nilai atau konsepsi karena penghasil norma yang merupakan bagian dan sistem budaya Indonesia itu bukanlah lembaga tunggal, melainkan banyak lembaga. Misalnya, Departemen (Kementerian), Direktorat Jenderal, kantor pemerintah dan bermacam-macam birokrasi lain, serta organisasi-organisasi nonpemerintah dan perkumpulan sosial lainnya: norma-norma itu mungkin saja tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lain. Karena itu, sistem budaya Indonesia lebih kurang terintegrasi dibandingkan dengan

sistem-sistem budayaa etnik yang relatif lebih sedikit perbedaan-perbedaan (di dalamnya). Sering kali yang demikian ini menyebabkan ketegangan-ketegangan yang serius di dalam sistem (Indonesia).

Pertumbuhan dan pengembangan sistem budaya Indonesia (Nasional) mempunyai pengaruh ganda atas sistem budaya etnik yang ada dan sistem-sistem budaya agama. Di satu pihak sistem budaya nasional Indonesia memungkinkan sistem budaya yang berbeda itu bersama-sama berada di bawah payung, konflik-konflik serius antara dua atau lebih di antara mereka dapat teratasi dengan kembali kepada nilai-nilai dan norma-norma kolektivitas yang diterima dalam sistem budaya Nasional Indonesia. Sebaliknya, posisi hierarkis sistem budaya Indonesia menyebabkan ketegangan, bukan konflik yang sebenarnya dengan sistem budaya nasional yang di "pasang" di atas semua sistem budaya (yang umumnya jauh lebih tua) cenderung menutup penyesuaian-penyesuaian sistem budaya yang lebih tua ini pada sistem budaya nasional.

## 2. Sistem Budaya Asing

Budaya Belanda, Amerika, Tiongkok, Jepang dan sistem budaya keduniawian lainnya yang berhasil masuk ke Indonesia tetap dikenal sebagai sistem budaya asing dan kemungkinan besar akan tetap begitu. Begitu pula unsur-unsur dari sistem budaya asing itu paling tidak sebagian besar, sistem ini dianggap asing di kepulauan Indonesia dan karena itu sulit bereksistensi.

Beberapa unsur dari sistem budaya asing ini telah menjadi bagian dari sistem budaya nasional Indonesia. Misalnya, pengetahuan ilmiah, meskipun berasal dari sistem budaya asing, ia telah dimasukkan menjadi bagian dari sistem budaya nasional atau setidaknya tidaknya dianggap begitu.

Dalam era penjajahan Belanda sebelum masa Perang Dunia II, kebudayaan Belanda diterima hanya di beberapa kalangan penduduk, sebagian besar orang Manado di Sulawesi Utara, orang Ambon di Maluku, orang Jawa dan Sunda di Jawa dan beberapa orang Minangkabau di Sumatera Barat. Mereka memakai bahasa Belanda, menggunakan nilai-nilai dan norma-norma Belanda untuk melakukan aktivitas tertentu. Orang-orang ini menjadi pegawai pada pemerintahan kolonial dan perusahaan Eropa, menjadi opir, anggota profesi modern seperti dokter, pengacara, insinyur, politikus, dan pengusaha. Bahkan

beberapa di antara mereka berpikir dan bertindaknya seperti orang Belanda. Beberapa anggota keluarga bangsawan ada juga yang mempelajari bahasa Belanda, namun tidak mengambil dan menggunakan nilai-nilai, serta norma-norma orang Belanda.

Ada orang-orang yang menolak penggunaan nilai-nilai dan norma Belanda itu, bahkan sebagian dari mereka ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha untuk mencegah perluasan pengaruh budaya asing ini. Sebagian besar penduduk pribumi malah tidak pernah memperoleh kesempatan untuk memilih (menggunakan atau menolak budaya Belanda itu), semata-mata karena budaya itu tak pernah menyentuh kehidupan mereka.

Kekalahan Belanda ketika pasukan Jepang memasuki kepulauan Indonesia pada tahun 1942, menyebabkan sistem budaya Belanda tidak berlaku lagi di kalangan penduduk pribumi Indonesia. Sistem budaya ini muncul kembali sebentar di antara orang-orang Indonesia tertentu, setelah Perang Dunia II, pemerintah kolonial Belanda mencoba menancapkan kembali kekuasaannya di bumi Nusantara, namun usaha itu gagal.

Meskipun penggunaan unsur-unsur budaya Belanda, termasuk bahasanya, tidak dilarang setelah Indonesia merdeka, konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai Papua (dahulunya Irian Barat) menyebabkan generasi muda di Indonesia tidak bergairah mempelajari bahasa Belanda dan tidak terdorong untuk menggunakan unsur sistem budaya Belanda. Generasi yang lebih tua dan sudah menguasai bahasa Belanda dan aspek-aspek budaya Belanda lainnya semakin berkurang dan sedang dalam perjalanan menuju kepunahan.

Selama periode konflik antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung sampai pertengahan tahun 1960-an, muncul suatu budaya yang baru, yakni sistem budaya Amerika. Kebudayaan baru ini menembus masuk universitas terkemuka, dunia pemerintahan, militer, usaha dan industri. Bahasa Inggris menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa asing yang penting di negeri ini. Orientasi budaya orang-orang terpelajar berganti haluan dari Eropa ke Amerika Serikat.

Sejak pertengahan kedua dekade 1960-an, dengan berakhirnya era Sukarno yang sangat nasionalis, beberapa sistem budaya asing lainnya mulai menyebar di kepulauan Indonesia. Budaya Jepang yang materialistik mungkin